



Katalog BPS : 9302001.51

Jilid I Sektoral

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI BALI 2009 – 2011



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**



Katalog BPS : 9302001.51

Jilid I Sektoral

**Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Bali
2009 – 2011**

<http://bali.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI BALI
2009 – 2011**

No. Publikasi : 51550.1103
Katalog BPS : 9302001.51
Ukuran Buku : 17,6 X 25 Cm
Jumlah Halaman : 122 + viii

Naskah :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Regional Accounts and Analysis Statistic Division

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR



Pada era keterbukaan informasi saat ini, data telah menjadi kebutuhan pokok berbagai pihak. Kegiatan perencanaan, pengendalian maupun evaluasi tidak bermakna apa-apa tanpa menggunakan data. Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS bertanggung jawab atas perstatistikan di Indonesia, termasuk perstatistikan di daerah. Karena itu, penyediaan data makro sebagai hasil dari kegiatan statistik merupakan tanggung jawab BPS sesuai tuntutan perundang-undangan. Dari sekian banyak data yang disajikan BPS di level nasional maupun daerah, terdapat beberapa data yang diseminasinya ditunggu berbagai pihak.

Salah satunya adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang penyajiannya terekam dalam sebuah buku atau publikasi. Publikasi PDRB Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011 Jilid I Sektorial ini merupakan publikasi rutin tahunan yang menyajikan beberapa indikator makro ekonomi di Provinsi Bali dalam lima tahun terakhir. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan perkembangan sektorial PDRB baik dari sisi harga berlaku maupun harga konstan, serta perkembangan PDRB per kapita, dan beberapa agregat makro ekonomi lainnya.

Disadari bahwa penyajian publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Kendati begitu, selalu diupayakan adanya penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan. Untuk itu, kritik dan saran dari pengguna dan pemakai data sangat diharapkan dalam penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Denpasar, April 2012
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Bali,



Ir. I Gde Suarsa, M.Si
NIP. 195506281979031002

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ~ i
KATA PENGANTAR ~ iii
DAFTAR ISI ~ v
DAFTAR TABEL ~ vii
DAFTAR GAMBAR ~ viii

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Fenomena Umum ~ 3
- 1.2. Maksud dan Tujuan ~ 10
- 1.3. Sumber Data ~ 11
- 1.4. Sistematika Penulisan ~ 11

KONSEP DAN DEFINISI

BAB II

- 2.1. Produk Domestik Regional Bruto ~ 15
- 2.2. Agregat PDRB ~ 17

BAB III RUANG LINGKUP, SUMBER DATA DAN METODE ESTIMASI

- 3.1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan ~ 23
- 3.2. Pertambangan dan Penggalian ~ 26
- 3.3. Industri Pengolahan ~ 27
- 3.4. Listrik, Gas, dan Air Bersih ~ 28
- 3.5. Bangunan/Konstruksi ~ 29
- 3.6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran ~ 31
- 3.7. Pengangkutan dan Komunikasi ~ 34
- 3.8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan ~ 36
- 3.9. Jasa - Jasa ~ 38

**ANALISIS DESKRIPTIF
PDRB BALI TAHUN 2009 - 2011**

BAB IV

- 4.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha ~ 45
- 4.2. Pembangunan Ekonomi Daerah dan Indeks
Location Quotient ~ 49
- 4.3. Struktur Perekonomian Bali ~ 67
- 4.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi ~ 72
- 4.5. PDRB per Kapita Bali ~ 82

P E N U T U P

BAB V

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1.** PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2011 (dalam juta rupiah) ~ **46**
- Tabel 4.2.** PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2011 (dalam juta rupiah) ~ **46**
- Tabel 4.3.** PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Basis Sektor Ekonomi Tahun 2009 – 2011 ~ **48**
- Tabel 4.4.** PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Basis Sektor Ekonomi Tahun 2009 – 2011 ~ **49**
- Tabel 4.5.** Ringkasan Teori Local Economic Development ~ **51**
- Tabel 4.6.** Indeks Location Quotient Provinsi Bali Berdasarkan Data PDRB Bali dan PDB Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2011 ~ **57**
- Tabel 4.7.** Indeks Location Quotient Provinsi Bali Berdasarkan Data PDRB Bali dan PDB Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2011 ~ **63**
- Tabel 4.8.** Kontribusi PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2011 (dalam persen) ~ **72**
- Tabel 4.9.** Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2011 (dalam persen) ~ **74**
- Tabel 4.10.** Sepuluh Negara Utama Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali Tahun 2009 – 2011 (dalam satuan orang) ~ **79**
- Tabel 4.11.** Laju Inflasi di Bali Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2009 – 2011 (dalam persen) ~ **82**
- Tabel 4.12.** Indikator Agregatif PDRB Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011 ~ **85**

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Indonesia Tahun 2009 - 2011 (dalam persen) ~ **6**
- Gambar 4.1.** Nilai Nominal PDRB Harga Berlaku Provinsi Bali Menurut Basis Sektor Ekonomi Tahun 2011 ~ **47**
- Gambar 4.2.** Kerangka Pemikiran Analisis *Location Quotient* Provinsi Bali ~ **53**
- Gambar 4.3.** Lima Sektor Ekonomi dengan Rata-Rata Indeks LQ > 1 pada Harga Berlaku di Provinsi Bali Selama Periode Tahun 2009 – 2011 ~ **60**
- Gambar 4.4.** Empat Sektor Ekonomi dengan Rata-Rata Indeks LQ < 1 pada Harga Berlaku di Provinsi Bali Selama Periode Tahun 2009 – 2011 ~ **64**
- Gambar 4.5.** Kontribusi Sektoral PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku (persen) ~ **68**
- Gambar 4.6.** Target dan Realisasi Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Bali (dalam persen) Tahun 2009 – 2011 ~ **73**
- Gambar 4.7.** Jumlah Kunjungan dan Pertumbuhan Wisman yang Datang ke Bali Tahun 2009 – 2011 ~ **77**
- Gambar 4.8.** *Source of Growth* Sektoral Provinsi Bali Tahun 2011 ~ **79**
- Gambar 4.9.** Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Bali Tahun 2009 – 2011 ~ **81**
- Gambar 4.10.** PDRB per kapita Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011 (juta rupiah) ~ **83**

<http://bali.bps.go.id>

Bab I

PENDAHULUAN

- Fenomena Umum
- Maksud dan Tujuan
- Sumber Data
- Sistematika Penulisan

<http://bali.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.bps.go.id>

1.1. Fenomena Umum

Cukup melegakan. Barangkali itulah yang pantas diungkapkan melihat kondisi perekonomian nasional yang terjadi di tahun 2011 lalu. Di tengah kondisi sulit, perekonomian nasional tahun 2011 mampu tumbuh 6,46 persen. Prediksi beberapa spekulasi mengenai dampak krisis keuangan global, akibat krisis utang yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa belum terasa di Indonesia sampai akhir tahun 2011 ini.

“ ... Selama tahun 2011, realisasi pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 6,49 persen, masih di atas angka nasional yang tumbuh 6,46 persen... ”

Hal demikian bisa terjadi karena Indonesia diuntungkan oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Dari sisi eksternal, faktor utama yang berpengaruh adalah krisis ekonomi global yang melanda Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah menyebabkan terjadinya defisit anggaran dalam jumlah besar. *Recovery* terhadap krisis yang berjalan lambat juga membawa keuntungan tersendiri bagi perekonomian nasional. Kemampuan bertahan dari hantaman krisis membuat Indonesia dipandang sebagai salah satu dari sedikit negara yang dapat memberikan keuntungan investasi besar.

Ditilik dari faktor internal, posisi sebagai negara dengan pasar terbesar keempat di dunia setelah China, Amerika, dan India membuka peluang yang sangat lebar bagi pergerakan pasar domestik. Selain itu, Indonesia juga diuntungkan dengan komposisi penduduk dimana 68% diantaranya adalah penduduk dalam usia produktif. Jumlah populasi usia produktif yang besar bisa mendorong pertumbuhan konsumsi yang signifikan.

Pemerintah bisa semakin percaya diri menatap perekonomian jika memberikan perhatian yang lebih besar pada sektor riil.

Pemulihan ekonomi di masa depan diharapkan tidak hanya terfokus kepada perbaikan keadaan makro ekonomi, namun juga penciptaan lapangan kerja dan perbaikan jaminan sosial. Tanpa adanya lapangan pekerjaan yang cukup dan jaminan pendapatan, maka tidak akan tercipta permintaan domestik yang akhirnya tidak terjadi proses pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

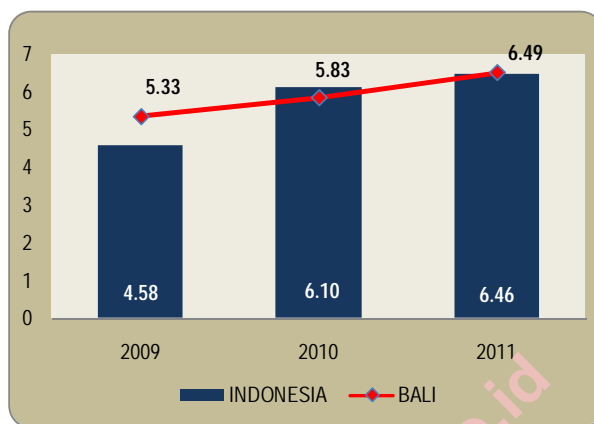
Peran negara-negara Asia, seperti China dan India, dalam memimpin kebangkitan ekonomi dunia semakin dominan. Indonesia sebagai salah satu negara besar di Asia turut berperan serta mendorong terciptanya kondisi ekonomi kawasan yang semakin kondusif dan stabil. Guncangan ekonomi yang terjadi di Eropa tidak sampai menyurutkan laju perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di kawasan tersebut. Dengan demikian, pemerintah mempunyai modal kuat untuk mengakselerasi sektor-sektor ekonomi agar dapat bergerak lebih cepat, efektif dan efisien.

Langkah Uni Eropa yang mengeluarkan paket penyelamatan atas krisis yang terjadi di kawasan tersebut, telah memberikan dampak positif sehingga kinerja ekonominya berangsur-angsur kembali membaik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator seperti menguatnya

konsumsi rumahtangga, membaiknya indeks penjualan retail, dan survei keyakinan konsumen yang mencerminkan optimisme akan terjadinya pemulihan di kawasan tersebut.

Salah satu penyelamat perekonomian Indonesia di tengah terpaan krisis keuangan global adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan menurut *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, Indonesia menjadi proyek percontohan pemberdayaan ekonomi rakyat. Alasannya, Indonesia dinilai berhasil menghadapi krisis global melalui pemberdayaan UMKM. Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3 - 6,8 persen per tahun, laju inflasi rata-rata 4 - 6 persen per tahun, tingkat pengangguran 5 - 6 persen per tahun, tingkat kemiskinan 8 - 10 persen, dan pendapatan perkapita 4.000 dolar AS pada akhir tahun 2014. Untuk mencapai itu, khususnya mengurangi angka kemiskinan, strategi yang digunakan adalah pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ini antara lain dengan memperluas pelayanan kredit usaha rakyat, pemasyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan wira usaha baru.

GAMBAR 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Indonesia
Tahun 2009 – 2011 (dalam persen)



Secara historis, di masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu periode tahun 2004 - 2008, pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,03 – 6,35 persen. Perlambatan ini sebagai akibat dari perekonomian dunia yang terkena badai krisis finansial.

Setelah tumbuh 4,58 persen di tahun 2009, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 6,10 persen pada tahun 2010, kemudian meningkat menjadi 6,46 persen pada tahun 2011.

Pasar domestik yang luas telah memungkinkan Indonesia memperkuat daya tahan perekonomian domestik. Menyadari akan cukup sulitnya memacu kinerja ekspor, sejak awal krisis ekonomi global para pengamat ekonomi dan juga pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk lebih mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri ketimbang produksi impor. Demi menjaga keberlanjutan produksi dalam negeri, dan untuk

mempertahankan lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat, pemerintah tidak saja mencanangkan cinta produksi dalam negeri dengan mencegah masuknya barang-barang impor, tetapi juga memacu konsumsi sektor swasta yang juga distimulir dengan peningkatan belanja negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut, terutama di negara-negara *emerging countries*, dan terjaganya stabilitas perekonomian telah memberikan dampak positif bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan telah memberikan kontribusi bagi terpeliharanya keseimbangan internal dan eksternal dalam perekonomian domestik. Hal tersebut menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan dan berkualitas.

Bercermin dari apa yang terjadi dalam perekonomian dunia maupun skala nasional sepanjang tahun 2011 tersebut sudah tentu membawa implikasi terhadap perekonomian Bali. Pasca tumbuh 5,83 persen di tahun 2009, ekonomi Bali tercatat tumbuh 6,01 persen pada Triwulan I – 2011 (Y on Y), kemudian meningkat menjadi 6,42 persen pada Triwulan II – 2011. Pada Triwulan III – 2011, ekonomi Bali kembali meningkat menjadi 6,54 persen, dan terus meningkat pada Triwulan IV – 2011 menjadi 6,95 persen. Alhasil, ekonomi Bali tumbuh 6,49 persen sepanjang tahun 2011. Angka ini

melampaui Kebijakan Umum APBD Provinsi Bali 2011 yang menargetkan 6,36 persen. Laju pertumbuhan ini lebih besar dari angka nasional yang tumbuh mencapai 6,46 persen.

Sejumlah **faktor pendorong (*push factor*)** laju pertumbuhan ekonomi Bali selama tahun 2011, antara lain:

1. Bergairahnya industri pariwisata (*services sector*), salah satunya ditandai dari meningkatnya jumlah kunjungan wisman 9,73 persen dalam setahun terakhir. Bahkan jumlah kunjungan wisman di tahun 2011 sebanyak 2,83 juta orang.
2. Rendahnya laju inflasi di Bali selama tahun 2011 yang hanya sebesar 3,75 persen. Angka ini lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 3,79 persen.
3. Meningkatnya permintaan domestik terkait beberapa hari raya keagamaan dan liburan sekolah
4. Meningkatnya permintaan ekspor Bali
5. Bergairahnya kinerja investasi
6. Ekspektasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap kinerja perekonomian Bali secara umum yang ditandai dari meningkatnya indeks tendensi konsumen
7. Penyerapan anggaran pemerintah yang tinggi
8. Bergairahnya kinerja sektor riil
9. Maraknya pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) di sejumlah kabupaten/kota di Bali

Laju pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro yang penting selain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor – sektor ekonomi) dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah sama dengan pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut. Apabila ”diibaratkan kue”, PDRB adalah besarnya kue tersebut. Pertumbuhan ekonomi sama dengan membesarnya kue tersebut yang pengukurannya merupakan persentase penambahan PDRB pada tahun tertentu terhadap PDRB tahun sebelumnya. Hasil penghitungan PDRB biasa dikenal sebagai ***PDRB menurut lapangan usaha (sektoral)*** maupun ***PDRB menurut pengeluaran/penggunaan***.

PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (*value added*) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Selain itu, dalam penyajiannya PDRB juga dibedakan menjadi:

- a. PDRB atas dasar harga konstan
- b. PDRB atas dasar harga berlaku

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan yang dihitung menurut harga tahun dasar. Saat ini BPS menggunakan

tahun dasar 2000. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan. Penghitungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri menggunakan konsep atas dasar harga konstan (*constant prices*) dengan tahun dasar 2000. Dengan demikian, PDRB merupakan data yang sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan dapat pula digunakan sebagai alat evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah berlangsung. Namun perlu diingat, penghitungan PDRB ini menggunakan konsep domestik. Artinya, seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di daerah/wilayah tertentu dihitung sebagai bagian dari nilai tambah yang dihasilkan daerah tersebut tanpa memperhatikan kepemilikan dari faktor produksi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Publikasi PDRB Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011 ini berisi data potensi ekonomi Provinsi Bali yang dilihat dari aspek produksi (*supply side*). Publikasi ini dimaksudkan untuk memberi informasi tentang data nilai tambah sektoral, struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan beberapa agregat ekonomi makro lainnya. Selain itu, disajikan pula analisis deskriptif yang secara ringkas menguraikan perkembangan ekonomi Bali dalam tiga tahun terakhir (periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011).

1.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan hingga terciptanya publikasi ini adalah hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan data struktur input dan nilai tambah untuk masing-masing sektor ekonomi diperoleh dari SKIO (Survei Koefisien Input Output), SKKI (Survei Khusus Koefisien Input), SKPR (Survei Khusus Pendapatan Regional) atau SKS (Survei Khusus Sektoral), dan beberapa survei khusus lainnya yang dilaksanakan oleh BPS. Data lain, khususnya yang berkaitan dengan data sekunder yang belum tersedia, diperoleh dari laporan yang dihimpun oleh masing-masing instansi/lembaga/kedinasan yang terkait.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, publikasi ini mencakup enam bab di mana masing-masing bab menguraikan hal-hal sebagai berikut.

1. **Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum, maksud dan tujuan, serta sumber data dan sistematika penulisan.
2. **Bab II Konsep dan Definisi.** Pada bab ini memuat tentang konsep dan definisi yang digunakan dalam menghitung PDRB Provinsi Bali selama periode tahun 2009 – 2011.
3. **Bab III Ruang Lingkup, Sumber Data dan Metode Estimasi.** Pada bab ini menguraikan tentang cakupan sektor dan metode estimasi yang digunakan untuk masing-masing sektor ekonomi menurut lapangan

usaha/sektoral (*supply side*).

4. **Bab IV Analisis Deskriptif PDRB Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011.** Pada bab ini berisi analisis secara deskriptif mengenai perkembangan ekonomi, baik dari aspek pertumbuhan, pendapatan per kapita, perubahan struktur ekonomi, serta perubahan agregat ekonomi lainnya di Provinsi Bali selama periode tahun 2009 – 2011.
5. **Bab V Penutup.** Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penghitungan dan analisis deskriptif PDRB Provinsi Bali selama tahun 2009 – 2011.

Bab II KONSEP DAN DEFINISI

- ❑ Produk Domestik Regional Bruto
- ❑ Agregat PDRB

<http://bali.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.bps.go.id>

2.1. Produk Domestik Regional Bruto

Pada dasarnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu region/wilayah dalam periode waktu tertentu. Untuk menghitung PDRB, ada tiga metode penghitungan yang biasa digunakan yakni sebagai berikut.

- a. **Dari sisi produksi.** Dalam konteks ini, PDRB merupakan jumlah nilai produk barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah

“ ... PDRB merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu region/wilayah dalam periode waktu tertentu. Ada tiga metode penghitungan PDRB yang biasa digunakan, yakni dari sisi produksi, pendapatan dan pengeluaran ... ”

dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini secara garis besar dikelompokkan menjadi sembilan lapangan usaha (sektoral), yakni: (1) Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas dan Air Bersih; (5) Bangunan/konstruksi; (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; dan (9) Jasa-jasa, termasuk jasa pelayanan pemerintah.

- b. **Dari sisi pendapatan.** Dalam konteks ini, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu

daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Selain variabel-variabel tersebut, penyusutan, pajak tidak langsung dan subsidi merupakan bagian yang harus diperhitungkan dalam penyusunan PDRB melalui pendekatan pendapatan ini. Kendati begitu, karena keterbatasan data yang tersedia, penghitungan PDRB dengan menggunakan pendekatan pendapatan belum dapat disajikan dalam publikasi PDRB Provinsi Bali.

- c. ***Dari sisi pengeluaran.*** Dalam konteks ini, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung (non profit), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Penyajian PDRB melalui pendekatan ini dapat melihat gambaran komposisi penggunaan barang dan jasa, baik yang diproduksi di wilayah Bali maupun yang berasal dari daerah lain (barang-barang impor). Secara matematis, PDRB menurut pendekatan pengeluaran ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = Ch + Cg + I + X - M$$

di mana :

Ch : Konsumsi Rumahtangga (*consumption household*)

Cg : Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan (*consumption government*)

I : Inventasi

X : Ekspor

M : Impor

Y : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara konseptual, ketiga metode penghitungan tersebut di atas memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan, dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan faktor-faktor produksinya. Kendati demikian, dalam publikasi ini hanya dimuat penghitungan PDRB menurut produksi (sektoral)

2.2. Agregat PDRB

Secara teoritis, agregat PDRB dibedakan menjadi beberapa komponen sebagai berikut:

a. *PDRB Atas Dasar Harga Berlaku*

Jumlah nilai produksi, nilai pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

b. *PDRB Atas Dasar Harga Konstan*

Jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai berdasarkan tahun dasar

tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Saat ini BPS menggunakan tahun dasar 2000.

c. PDRB Atas Dasar Harga Pasar

PDRB atas dasar harga pasar dapat diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (NTB) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Yang dimaksud nilai tambah (*value added*) adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya-biaya antara. Dengan demikian, nilai tambah di sini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung.

d. Produk Domestik Regional Neto (PDRN)

Perbedaan konsep neto di sini dan konsep bruto di atas adalah karena pada konsep bruto masih terdapat komponen penyusutan, sedangkan pada konsep neto penyusutan itu telah dikeluarkan. Jadi PDRB atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh PDRN atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susut barang-barang modal yang terjadi selama barang modal tersebut digunakan dalam proses produksi.

e. PDRB Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor dan biaya pasar adalah karena adanya pajak tidak langsung yang

dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor, cukai dan pajak pertambahan nilai lainnya, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan yang merupakan bagian dari pajak langsung. Sedangkan subsidi pemerintah biasanya digunakan untuk mengontrol stabilitas harga di pasar. Sementara itu, pajak tidak langsung neto merupakan selisih antara pajak tidak langsung dikurangi subsidi. Jadi PDRN atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto adalah sama dengan PDRN atas dasar biaya faktor.

f. *Pendapatan Regional*

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor itu sebenarnya merupakan balas jasa terhadap faktor-faktor produksi di region/wilayah tersebut. PDRN atas dasar biaya faktor merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah gaji, sewa tanah dan keuntungan, dan merupakan pendapatan yang berasal dari region/wilayah tersebut. Tetapi pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk region/wilayah itu. Sebab, ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk region/wilayah lain. Misalnya, suatu perusahaan yang beroperasi disuatu region/wilayah, tetapi pemilik modalnya dari region/wilayah lain.

Sebaliknya, kalau ada penduduk region/wilayah tersebut menanam modal di region/wilayah lain, maka sebagian keuntungan perusahaan akan mengalir ke dalam region/wilayah tersebut dan menjadi pendapatan dari pemilik modal. Jika produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir ke luar, maka hasilnya merupakan produk domestik regional neto, yakni merupakan pendapatan yang benar-benar diterima (*income receipt*) oleh penduduk yang tinggal di region/wilayah tersebut. Akan tetapi untuk menghitung *income receipt* itu masih sangat sulit. Sampai saat ini masih sulit mendapatkan jumlah pendapatan yang mengalir ke luar/masuk di suatu region/wilayah tertentu.

g. Pendapatan per kapita

Bila pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di region/wilayah tersebut, maka akan diperoleh pendapatan per kapita, yakni pendapatan yang diterima oleh tiap penduduk.

Bab III

RUANG LINGKUP, SUMBER DATA DAN METODE ESTIMASI

- Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Listrik, Gas, dan Air Bersih
- Bangunan/Konstruksi
- Perdagangan, Hotel, dan Restoran
- Pengangkutan dan Komunikasi
- Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- Jasa - Jasa



Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.pps.go.id>

3.1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan

a. Ruang Lingkup

Kegiatan ekonomi yang termasuk sektor ini meliputi pengolahan lahan untuk bercocok tanam, pemeliharaan ternak dan unggas, pemotongan hewan, penebangan kayu pengambilan hasil hutan, perburuan, serta usaha pemeliharaan dan penangkapan berbagai jenis ikan. Termasuk pula dalam sektor-sektor ini kegiatan pengolahan hasil-hasil pertanian, peternakan, kehutanan

“ ... Ruang lingkup, sumber data dan metode estimasi yang digunakan dalam penyajian PDRB Provinsi Bali ini didasarkan pada kegiatan ekonomi yang tercover dalam sembilan lapangan usaha/sektor ekonomi selama periode tahun 2009 - 2011 ... ”

dan perikanan yang dilakukan secara sederhana, yang masih menggunakan peralatan-peralatan tradisional. Komoditi-komoditi yang dihasilkan dari usaha-usaha bercocok tanam antara lain padi, jagung, ketela pohon, umbi-umbian, kacang

tanah, kedele, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, tebu, kelapa, kopi dan rempah-rempah yang diusahakan oleh rakyat.

Hasil-hasil dari usaha peternakan mencakup anak dan penambahan berat ternak yang dipelihara seperti sapi, kerbau, babi, kuda, kambing, dan hasil-hasil lainnya seperti telur, susu dan kotoran hewan. Hasil-hasil dari kehutanan antara lain, segala jenis kayu tebangan, tanaman hasil penghijauan, dan hasil dari perburuan seperti sarang burung walet. Hasil-hasil dari perikanan

berupa segala jenis ikan yang ditangkap di laut, sawah, kolam, tambak, dan tempat-tempat perairan umum lainnya.

Kegiatan pengolahan sederhana seperti pembuatan kopra, minyak nabati rakyat, gula merah, pengupasan dan pembersihan kopi, pengirisan tembakau serta penggaraman dan pengeringan ikan juga dimasukkan dalam sektor ini, kecuali penumbukan padi digabungkan dengan sektor industri penggilingan padi-padian.

b. Sumber Data dan Metode Estimasi

Data produksi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, kacang rambut, kacang tanah dan kedele diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Data sayur-sayuran dan buah-buahan diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali. Data produksi tanaman perkebunan yang dilakukan oleh perkebunan rakyat diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Bali.

Produksi peternakan menurut konsep adalah pertambahan hewan dan hasil-hasil peternakan. Pertambahan hewan meliputi anak dan pembesarannya yang diasumsikan sama dengan pemotongan, selisih populasi dan ekspor neto hewan hidup. Data pemotongan populasi hewan dan keluar masuk hewan di peroleh dari Dinas Peternakan Provinsi Bali. Demikian juga data hasil-hasil peternakan berupa telur dan susu murni diperoleh dari Dinas Peternakan Provinsi Bali. Data produksi

kehutanan berupa kayu pertukangan, kayu bakar dan hasil perburuan diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Kayu dan bambu yang berasal dari perkebunan dihitung dengan menggunakan data hasil studi khusus.

Data produksi perikanan laut dan perikanan darat diperoleh dari Dinas Perikanan Provinsi Bali. Data harga yang digunakan untuk menilai produksi pertanian pada umumnya diperoleh dari BPS Provinsi Bali, antara lain harga perdagangan besar, harga eceran, harga produsen, harga ekspor dan impor. Harga produsen diperlukan untuk menilai produksi, yakni suatu tingkat harga yang bebas dari margin perdagangan dan biaya pengangkutan. Dari survei khusus yang dilakukan oleh BPS telah diperoleh keterangan mengenai besarnya margin perdagangan, biaya transport termasuk persentase barang-barang yang diperdagangkan (*marketed surplus*).

Output merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan harga produsen. Dalam penghitungan PDRB, dikenal tiga kelompok produksi yakni produksi utama, produksi ikutan dan produksi sampingan. Produksi utama adalah hasil yang paling banyak dalam kuantitas, nilai atau terpenting dibanding dengan hasil lainnya. Produksi ikutan adalah hasil yang selalu terbentuk secara otomatis dengan produksi utama, sedangkan produksi sampingan adalah hasil-hasil selain produksi utama dan ikutan. Nilai produksi sampingan dan ikutan merupakan bagian dari output suatu sektor dan pada umumnya dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap

produksi utama. Sebagai contoh, gabah merupakan produksi utama dan merang sebagai produksi ikutan. Nilai merang dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai gabah, yang diperoleh dari survei khusus. Selanjutnya, susunan atau struktur input yang terdiri dari input antara dan input primer dihitung berdasarkan berbagai survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Bali. Survei yang dilakukan antara lain Survei Struktur Ongkos Usaha Padi dan Palawija, Survei Khusus Koefisien Input (SKKI) dan Survei Khusus Input – Output (SKIO).

3.2. Pertambahan dan Penggalian

a. Ruang Lingkup

Lapangan usaha yang termasuk dalam sektor penggalian mencakup seluruh usaha penggalian rakyat. Pada dasarnya usaha sektor ini dimaksudkan untuk memperoleh barang-barang galian, seperti batu, pasir, kapur, tanah liat, dan garam.

b. Sumber Data dan Metode Estimasi

Data produksi diperoleh dari BPS Provinsi Bali, sedangkan harga dan susunan input diperoleh dari hasil survei khusus. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa output per komoditi diperoleh dengan mengalikan produksi dengan harga produsen. Susunan input diperoleh dengan mengalikan koefisien input hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) dengan output masing-masing komoditi.

3.3. Industri Pengolahan

a. Ruang Lingkup

Sektor industri meliputi semua kegiatan produksi yang bertujuan meningkatkan kualitas barang dan jasa. Proses produksi dapat dilakukan secara mekanik, kimiawi ataupun proses lainnya dengan menggunakan alat-alat sederhana dan mesin-mesin. Proses tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan industri, perusahaan pertanian, pertambangan atau oleh perusahaan lainnya. Jasa-jasa yang sifatnya menunjang sektor industri seperti jasa maklon, perbaikan dan pemeliharaan mesin-mesin. Yang dimaksud dengan perbaikan disini adalah perbaikan barang modal yang dilakukan oleh perusahaan sendiri atau pihak lain, tetapi perbaikan mesin-mesin milik rumah tangga dan kendaraan bermotor tidak dicakup dalam sektor ini, melainkan dalam sektor jasa-jasa.

b. Sumber Data dan Metode Estimasi

Data yang digunakan dalam penghitungan output dan penyusunan struktur input sektor industri pengolahan adalah hasil Survei Tahunan Industri Besar dan Sedang untuk kelompok industri besar/sedang serta hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR). Sedangkan untuk menghitung industri kecil rumah tangga dilakukan melalui indikator tenaga kerja di sektor tersebut yang bersumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Dengan demikian, penghitungan output dan penyusunan struktur input sektor ini dibedakan atas output industri

besar dan sedang di satu pihak serta industri kecil dan kerajinan rumah tangga di pihak lain.

3.4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

a. Ruang Lingkup

Lapangan usaha yang termasuk dalam sektor listrik meliputi kegiatan pembangkit dan distribusi tenaga listrik yang diselenggarakan oleh PLN maupun non-PLN. Termasuk pula tenaga listrik (produksi sampingan) yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan-perusahaan, seperti perusahaan perkebunan, industri dan sektor lain. Sebaliknya, tenaga listrik yang dibangkitkan untuk digunakan oleh sektor itu sendiri tidak termasuk dalam rincian ini. Yang dimaksud dengan produksi listrik adalah jumlah KWH tenaga listrik yang dibangkitkan dan meliputi tenaga listrik yang terjual, susut dalam transmisi dan distribusi.

Sektor air minum mencakup kegiatan pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air bersih, termasuk penyaluran melalui pipa baik ke rumah tangga maupun perusahaan sebagai pemakai.

b. Sumber Data dan Metode Estimasi

Data yang dipergunakan untuk menghitung output dan susunan input diperoleh dari survei tahunan yang meliputi listrik PLN, listrik non-PLN dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

3.5. Bangunan/Konstruksi

a. Ruang Lingkup

Sektor bangunan/konstruksi mencakup kegiatan konstruksi yang dilakukan baik oleh konstruksi umum, yakni perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain maupun oleh konstruksi khusus, yakni unit usaha dan individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri seperti misalnya kantor pemerintah, kantor swasta, rumah tangga dan unit-unit perusahaan bukan perusahaan bangunan/konstruksi. Kegiatan konstruksi mencakup kegiatan pembuatan, pembangunan, pemasangan dan perbaikan berat maupun ringan dari semua jenis konstruksi seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, pekerjaan umum untuk pertanian, jalan jembatan dan pelabuhan, bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi serta bangunan lainnya.

Bangunan tempat tinggal mencakup rumah dan gedung atau bangunan fisik lainnya yang digunakan untuk tempat tinggal. Bangunan bukan tempat tinggal meliputi hotel, sekolah, rumah sakit, pusat pertokoan, perkantoran dan pusat perdagangan, industri atau pabrik, bangunan pergudangan, bangunan tempat pemeliharaan hewan ternak dan unggas, bangunan tempat ibadah, bangunan gedung kesenian dan olah raga serta bangunan bukan tempat tinggal lainnya. Pekerjaan umum untuk pertanian meliputi pembuatan kolam pemeliharaan ikan, pencetakan

tanah sawah, pembukaan hutan, irigasi dan sejenisnya, termasuk pula dalam kategori ini.

Selain itu, bangunan bukan tempat tinggal juga meliputi pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan diantaranya mencakup pembuatan sarana jalan dan jembatan untuk angkutan jalan raya, pelabuhan laut dan udara, dermaga, landasan pesawat terbang, tempat parkir, trotoar dan sejenisnya. Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi diantaranya adalah instalasi transmisi dan distribusi, gas, air minum dan jaringan komunikasi. Sedangkan jenis bangunan yang digolongkan bangunan bukan tempat tinggal lainnya beberapa diantaranya adalah bangunan taman kota, waduk, banjir kanal, sanitasi, lapangan olah raga dan tempat rekreasi serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah.

Konsep output sektor bangunan/konstruksi adalah nilai pekerjaan yang telah dilakukan selama setahun, tanpa melihat apakah bangunan tersebut sudah selesai seluruhnya atau belum pada tahun tersebut. Nilai instalasi listrik, pengatur hawa (AC), instalasi air dan barang-barang lain yang telah dipasang pada bangunan sebelum bangunan tersebut ditempati/digunakan dicakup pula di dalam output sektor bangunan/konstruksi, tetapi nilai tanah tempat bangunan berdiri tidak termasuk ke dalam nilai bangunan.

b. Sumber Data dan Metode Estimasi

Perkiraan output sektor bangunan/konstruksi didasarkan pada pendekatan arus barang (*commodity flow approach*), yakni suatu metode pendugaan output sektor bangunan/ konstruksi berdasarkan input yang diperoleh dari sektor lain. Seperti diketahui, input dibedakan atas dua macam yakni input-antara dan input-primer, yang jumlahnya sama dengan output. Input antara disini berupa bahan bangunan maupun bukan bahan bangunan misalnya biaya pemasangan dan biaya administrasi atau bahan-bahan lainnya.

Untuk pendugaan input antara, dapat dibedakan dua sumber yakni untuk input yang diimpor dan input antara dari produksi dalam negeri. Sumber data yang digunakan adalah Statistik Impor, Statistik Industri Besar dan Sedang, Statistik Pertambangan dan Statistik Pertanian yang keseluruhannya diperoleh dari BPS. Selanjutnya, biaya administrasi, input primer dan distribusi jenis output bangunan didasarkan pada survei konstruksi dan Survei Khusus Input – Output (SKIO) pada sektor konstruksi.

3.6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

a. Ruang Lingkup

Kegiatan perdagangan meliputi pengumpulan barang dari produsen atau pelabuhan impor, kemudian menyalurkannya kepada konsumen tanpa merubah bentuk barang tersebut. Kegiatan perdagangan dibedakan menjadi perdagangan besar dan eceran. Kegiatan

perdagangan besar, pada umumnya melayani pedagang lainnya, perusahaan produksi serta konsumen bukan rumah tangga lainnya. Kegiatan perdagangan eceran, pada umumnya melayani konsumen rumah tangga. Barang-barang yang diperdagangkan meliputi produksi dalam negeri maupun impor, kecuali barang tidak bergerak seperti tanah, sumber-sumber alam dan bangunan. Kegiatan yang dilakukan oleh broker, makelar, komisioner, agen dan sejenisnya sepanjang masih bersifat perdagangan termasuk pula dalam rincian ini.

Kegiatan restoran pada umumnya menyediakan makanan dan minuman jadi yang dapat dinikmati langsung di tempat penjualan, meliputi usaha restoran, bar, warung makan, usaha-usaha jasa boga dan sejenisnya. Penyediaan makanan dan minuman yang bersifat menunjang usaha utama tidak dimasukkan sebagai kegiatan restoran, misalnya kegiatan penyediaan makanan dan minuman pada perhotelan, pada angkutan penumpang dengan kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan kegiatan perhotelan meliputi usaha penyediaan akomodasi untuk umum berupa tempat penginapan untuk jangka waktu relatif singkat. Pengusahaan bungalow, villa dan tempat peristirahatan lainnya yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi dan terutama ditujukan untuk para anggota dan pegawainya, tidak termasuk dalam kegiatan ini.

b. Sumber Data dan Metode Estimasi

Sumber data untuk penyusunan struktur input perdagangan adalah hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) atau Survei Khusus Sektoral (SKS) yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Data restoran diperkirakan dengan menggunakan pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor restoran. Angka pertumbuhan ini dihitung berdasarkan hasil Sensus Penduduk. Output per tenaga kerja dan struktur inputnya diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR). Sedangkan sumber data perhotelan adalah dari Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel yang diterbitkan oleh BPS. Dan rata-rata tarif per malam kamar dan struktur inputnya diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR).

Output perdagangan besar dan eceran masing-masing dihitung berdasarkan pendekatan arus barang, yakni dengan menjumlahkan margin perdagangan yang timbul dari seluruh barang yang diperdagangkan di dalam region/wilayah Provinsi Bali. Rasio margin perdagangan besar dan eceran baik terhadap nilai produksi masing-masing sektor maupun terhadap nilai impor diperoleh dari rasio margin Tabel Input – Output Provinsi Bali.

Output restoran diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output perhotelan dari hasil perkalian antara jumlah malam kamar dengan rata-rata tarif per malam kamar. Struktur input perdagangan, restoran dan perhotelan masing-masing diperoleh dari

hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) dan Survei Khusus Input – Output (SKIO).

3.7. Pengangkutan dan Komunikasi

a. Ruang Lingkup

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan angkutan, baik angkutan barang maupun penumpang, jasa penunjang angkutan dan komunikasi. Sektor-sektor ini terdiri dari angkutan jalan raya, bus, taksi dan dokar maupun truk dan pedati, serta angkutan laut untuk barang dan penumpang seperti pelayaran samudera, pelayaran nusantara, pelayaran lokal dan pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau serta angkutan udara untuk barang dan penumpang.

Jasa penunjang angkutan dan pergudangan umumnya bertujuan membantu dan memperlancar kegiatan angkutan, terdiri dari jasa-jasa terminal, pelabuhan bongkar muat, keagenan, ekspedisi, jalan tol, pergudangan dan jasa penunjang lainnya. Komunikasi meliputi usaha jasa pos dan giro seperti kegiatan pengiriman surat, paket, wesel, telegram dan lain sebagainya.

b. Sumber Data dan Metode Estimasi

Output dan struktur input angkutan jalan raya disusun dengan menggunakan data statistik kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Output angkutan laut diperoleh dari statistik angkutan laut. Sedangkan struktur inputnya didasarkan pada hasil Survei

Khusus Pendapatan Regional (SKPR). Data mengenai output maupun struktur input untuk sektor angkutan udara diperoleh dari hasil survei angkutan udara. Sedangkan data yang digunakan untuk penyusunan output dan struktur input untuk pos dan telekomunikasi diperoleh dari laporan tahunan dan ikhtisar rugi/laba PT. Pos Indonesia.

Output angkutan jalan raya diperoleh dari perkalian antara jumlah kendaraan menurut jenisnya dengan masing-masing rata-rata output per kendaraan. Output angkutan laut diperoleh dari hasil pengolahan data statistik angkutan laut yang merupakan penjumlahan pendapatan dari angkutan barang dan penumpang. Output angkutan udara diperoleh langsung dari jumlah penumpang yang berangkat dikalikan tarif. Output jasa penunjang angkutan diperoleh dari perkalian antara masing-masing indikator produksi seperti jumlah kendaraan, kapal, pesawat yang dilayani dengan tarif atau rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh kegiatan angkutan untuk pelayanan tersebut.

Struktur input untuk angkutan udara dan komunikasi diolah langsung dari data yang berasal dari laporan tahunan masing-masing perusahaan. Sedangkan angkutan jalan raya, angkutan laut serta jasa penunjang angkutan didasarkan pada koefisien input hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR), dan laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam bidang usaha bersangkutan.

3.8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

a. Ruang Lingkup

Kegiatan bank dan lembaga keuangan lainnya meliputi:

1. Usaha jasa perbankan dan moneter seperti bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank devisa dan bank tabungan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Kegiatan ini mencakup antara lain penerimaan dan pemberian pinjaman, penyertaan modal usaha, pemberian jaminan bank, pembelian dan penjualan surat-surat berharga, jasa penyimpanan barang berharga dan lain sebagainya.
2. Usaha jasa keuangan lainnya seperti lumbung desa, koperasi simpan pinjam, pedagang valuta asing serta jasa pasar modal.
3. Usaha jasa asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi bukan jiwa termasuk asuransi sosial yang dikelola oleh Perum TASPEN, Perum ASABRI, Perum ASTEK dan sejenisnya.
4. Usaha persewaan bangunan dan tanah baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan serta usaha persewaan tanah.

Output dari jasa perbankan meliputi penerimaan provisi dan komisi, penerimaan neto transaksi devisa, pendapatan operasional lainnya, serta imputasi jasa pelayanan bank. Output dari pedagang valuta asing

merupakan selisih antara penjualan dengan pembelian mata uang, sedangkan output asuransi merupakan selisih antara penerimaan premi dan klaim ditambah dengan pendapatan dari penyertaan modal usaha serta pendapatan lainnya. Output dari kegiatan-kegiatan lainnya pada umumnya merupakan nilai dari jasa yang diberikan pada pihak lain.

b. Sumber Data dan Metode Estimasi

Data perbankan diperoleh dari Bank Indonesia, sedangkan data asuransi diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR). Data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sumber data usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal adalah hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) atau Survei Khusus Sektoral (SKS).

Data jasa perusahaan diperoleh dari hasil pelaksanaan Sensus Ekonomi untuk jumlah perusahaan serta hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) atau Survei Khusus Sektoral (SKS) untuk struktur inputnya. Output kegiatan perbankan diperoleh langsung dari Bank Indonesia, sedangkan kegiatan lainnya seperti data pegadaian dan lembaga keuangan lain bukan bank diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) atau Survei Khusus Sektoral (SKS).

Output dari kegiatan asuransi merupakan penjumlahan output asuransi jiwa, asuransi bukan jiwa,

asuransi sosial dan reasuransi. Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran rumah tangga, pajak dan biaya pemeliharaan rumah per kapita dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan output persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan hasil listing Sensus Ekonomi dengan rata-rata output per tenaga kerja yang bersumber dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) atau Survei Khusus Sektoral (SKS).

Sementara itu, struktur input untuk perbankan dan asuransi diperoleh dari pengolahan terhadap data yang berasal dari sumber masing-masing. Sedangkan struktur input untuk kegiatan-kegiatan lainnya umumnya diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) atau Survei Khusus Sektoral (SKS).

3.9. Jasa – Jasa

a. Ruang Lingkup

Yang termasuk dalam sektor ini adalah sektor pemerintahan dan jasa-jasa. Sektor jasa – jasa yang dimaksud meliputi kegiatan – kegiatan sebagai berikut.

1. Usaha jasa perusahaan seperti pengacara, notaris, akuntan, arsitektur, konsultan tehnik, konsultan pajak, jasa pengadaan tenaga kerja, pengolahan data, periklanan, pemetaan, riset dan pemasaran, sewa menyewa mesin dan peralatan, serta lain sebagainya.

2. Jasa pemerintahan umum dan pertahanan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Jasa kemasyarakatan yang meliputi jasa pendidikan, kesehatan, riset, palang merah, panti asuhan, panti weda, rumah ibadah dan lain sebagainya.
4. Jasa hiburan dan rekreasi yang meliputi kegiatan produksi dan distribusi film, baik film komersial dan reproduksi film video, maupun film dokumenter untuk kepentingan pemerintah, jasa bioskop dan panggung hiburan, gedung olah raga, kolam renang, klub malam, taman hiburan dan lain sebagainya. Studio televisi dan stasiun pemancar yang dikelola oleh TVRI tidak termasuk dalam rincian ini, tetapi dimasukkan ke dalam sektor jasa pemerintahan umum dan pertahanan.
5. Jasa perbengkelan yang meliputi bangkel kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, reparasi TV, radio, lemari es, kamera, alat musik, barang-barang dari kulit dan lain sebagainya.
6. Jasa perorangan dan rumah tangga meliputi jasa yang berkaitan erat dengan perorangan dan rumah tangga seperti tukang cukur, tukang jahit, binatu, salon, kecantikan, pembantu rumah tangga, pengasuh bayi dan lain sebagainya.

b. Sumber Data dan Estimasi

Data yang digunakan untuk penyusunan nilai tambah bruto kegiatan jasa-jasa, diperoleh dari beberapa

sumber. Data sektor pemerintahan dan pertahanan diperoleh dari Direktorat Anggaran, Departemen Keuangan untuk pemerintah pusat serta daftar K1, K2 dan K3 yang disajikan oleh BPS untuk pemerintah daerah, indikator produksi untuk jasa kemasyarakatan, penduduk tahun 2011, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa sumber lainnya. Data struktur input, sebagian besar didasarkan pada hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) atau Survei Khusus Sektoral (SKS).

Indikator produksi untuk jasa hiburan dan rekreasi diperoleh dari Statistik Bioskop, Dinas Pariwisata dan sumber lainnya. Sedangkan struktur inputnya didasarkan pada hasil Survei Khusus Input – Output (SKIO). Indikator produksi untuk jasa perbengkelan, jasa perorangan dan rumah tangga adalah jumlah tenaga kerja di sektor tersebut. Angka jumlah tenaga kerja itu dihitung dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Struktur input sektor jasa perbengkelan, jasa perorangan dan rumah tangga disusun berdasarkan hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR). Penghitungan output untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Output kegiatan pemerintahan adalah semua belanja pusat dan daerah baik yang berasal dari belanja rutin maupun dari belanja pembangunan serta penyusutan barang modal.

2. Output jasa perusahaan secara keseluruhan diperoleh dari perkalian antara jumlah perusahaan dengan rata-rata output per perusahaan.
3. Output jasa masyarakat diperoleh dari perkalian antara masing-masing indikator produksi dengan rata-rata output. Indikator yang dimaksud antara lain jumlah murid menurut tingkatan, jumlah tempat tidur rumah sakit, jumlah dokter, jumlah anak yang diasuh, jumlah orang lanjut usia yang dirawat.
4. Output bioskop diperoleh dari perkalian antara jumlah tempat duduk dengan output rata-rata per tempat duduk.
5. Output panggung kesenian dihitung berdasarkan pembagian antara pajak tontonan yang diterima pemerintah dengan rasio pajak tontonan, kemudian dikurangi dengan output bioskop.
6. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja, masing-masing dengan rata-rata outputnya.
7. Output untuk jasa perbengkelan serta jasa perorangan dan rumah tangga diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja.
8. Output jasa pembantu rumah tangga, pengasuh bayi dan sejenisnya diperoleh dari perkalian antara pengeluaran per kapita untuk pembantu rumah tangga dengan jumlah penduduk.

Struktur input kegiatan jasa - jasa umumnya didasarkan pada hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) yang dilengkapi dengan beberapa data tambahan yang berasal dari sumber lainnya.

<http://bali.bps.go.id>

Bab IV

ANALISIS DESKRIPTIF PDRB BALI TAHUN 2009 – 2011

- PDRB Menurut Lapangan Usaha
- Pembangunan Ekonomi Daerah dan Indeks *Location Quotient*
- Struktur Perekonomian Bali
- Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
- PDRB per Kapita Bali

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.bps.go.id>

4.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, struktur perekonomian Bali didominasi oleh sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata. Perkembangan pariwisata telah membuat ekonomi Bali lebih tergantung pada sektor tersier ketimbang sektor primer ataupun sekunder. Perekonomian yang dibangun dengan mengandalkan industri pariwisata sebagai *leading sektor*, membuat kondisi eksternal memegang peran penting bagi keberlangsungan ekonomi Bali.

Potret kinerja ekonomi Bali selama periode tahun 2009 – 2011 yang ditopang industri pariwisata secara nyata tergambar pada peningkatan nilai PDRB Provinsi Bali yang dihasilkan pada masing-masing lapangan usaha/sektor ekonomi. Pada tahun 2011, total nilai tambah yang tercipta (PDRB atas dasar harga berlaku) di Bali mencapai Rp 73,48 trilyun. Padahal di tahun 2009, nilai tambah yang tercipta baru mencapai Rp 60,29 trilyun atau meningkat sebesar 21,88 persen. (Lihat **Tabel 4.1**). Angka ini telah melampaui target KUA Provinsi Bali yang mematok besaran Rp. 70,19 trilyun

Kendati demikian, nilai PDRB tersebut masih merupakan nilai yang dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga untuk melihat perubahan nilai tambah secara riil (perkembangan produksi barang dan jasa secara riil) perlu dilihat perkembangan PDRB atas dasar harga konstan. Harga konstan yang digunakan disini berdasarkan tahun 2000.

TABEL 4.1.

**PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2011 (dalam Juta Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pertanian	11,326,122.99	12,097,348.42	12,743,484.83
2	Pertambangan dan Penggalian	387,916.96	466,486.73	539,564.45
3	Industri Pengolahan	5,588,427.59	6,120,473.78	6,572,988.90
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,163,778.95	1,263,308.88	1,429,611.41
5	Bangunan	2,760,100.13	3,033,986.71	3,440,423.58
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	17,868,607.67	20,016,062.16	22,499,946.97
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8,194,713.71	9,628,024.27	10,626,582.39
8	Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,234,063.20	4,548,558.14	4,946,582.66
9	Jasa- jasa	8,768,508.14	9,516,349.04	10,678,976.68
PDRB		60,292,239.32	66,690,598.13	73,478,161.87

Sumber : BPS Provinsi Bali

TABEL 4.2.

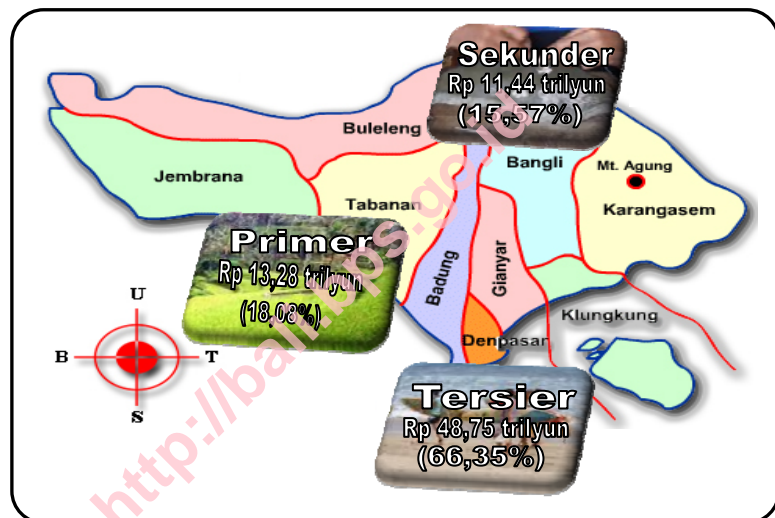
**PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2011 (dalam Juta Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pertanian	5,645,784.85	5,745,218.98	5,873,306.31
2	Pertambangan dan Penggalian	157,971.73	188,664.53	208,488.02
3	Industri Pengolahan	2,768,110.35	2,936,448.09	3,027,992.41
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	410,371.98	438,590.34	470,830.61
5	Bangunan	1,067,443.02	1,146,121.48	1,236,386.67
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,656,017.41	9,209,066.19	10,005,651.57
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,016,617.21	3,190,556.74	3,380,964.69
8	Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,899,187.64	2,041,019.60	2,167,882.16
9	Jasa- jasa	3,669,441.42	3,985,000.25	4,382,171.61
PDRB		27,290,945.61	28,880,686.20	30,753,674.05

Sumber : BPS Provinsi Bali

Nilai tambah riil (PDRB atas dasar harga konstan) yang tercipta di Bali selama tahun 2011 mencapai 30,75 triliun rupiah atau meningkat sebesar 12,69 persen jika dibandingkan dengan nilai tambah riil di tahun 2009 (lihat Tabel 4.2).

GAMBAR 4.1.
Nilai Nominal PDRB Harga Berlaku Provinsi Bali
Menurut Basis Sektor Ekonomi Tahun 2011



Selanjutnya, dari **Gambar 4.1** dapat dilihat berapa besar *share* yang dihasilkan oleh masing-masing sektor di Bali. Sektor tersier (berbasis jasa-jasa) menempati peringkat pertama dengan *share* terbesar yakni senilai Rp 48,75 triliun (66,35%). Penyumbang berikutnya adalah sektor primer (berbasis pertanian) senilai Rp 13,28 triliun (18,08%) dan yang terakhir adalah sektor sekunder (berbasis industri pengolahan) senilai Rp 11,44 triliun (15,57%).

TABEL 4.3.
**PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Basis Sektor Ekonomi Tahun 2009 – 2011**

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Nilai Nominal (Juta Rp) :				
1	Primer	11,714,039.95	12,563,835.15	13,283,049.29
2	Sekunder	9,512,306.66	10,417,769.37	11,443,023.88
3	Tersier	39,065,892.72	43,708,993.61	48,752,088.69
PDRB		27,290,945.61	28,880,686.20	30,753,674.05
<i>Share (%) :</i>				
1	Primer	19.43	18.84	18.08
2	Sekunder	15.78	15.62	15.57
3	Tersier	64.79	65.54	66.35
PDRB		100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Bali

Berdasarkan **Tabel 4.3** dapat dilihat lebih lengkap mengenai *share* masing-masing sektor di Bali. Dari tahun ke tahun, sektor tersier memiliki kecenderungan meningkat. Dari 64,79% di tahun 2009, menjadi 65,54% di tahun 2010 dan selanjutnya 66,35% di tahun 2011.

Sebaliknya sektor primer sebagai basis pertanian mengalami *share* yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Tercatat di tahun 2009, *share* sektor ini sebesar 19,43%, kemudian menurun di tahun 2010 menjadi 18,84% dan menurun kembali di tahun 2011 menjadi hanya 18,08%.

Hal yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh *share* sektor sekunder (basis industri pengolahan) yang memiliki tren menurun sejak tahun 2009. Di tahun 2009, *share* sektor ini sebesar 15,78%; 15,62% di tahun 2010 dan terakhir di 2011 tercatat sebesar 15,57%.

TABEL 4.4.
PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Basis Sektor Ekonomi Tahun 2009 – 2011

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Nilai Nominal (Juta Rp) :			
1	Primer	5,803,756.58	5,933,883.51	1,532,199.51
2	Sekunder	4,245,925.35	4,521,159.91	1,175,494.03
3	Tersier	17,241,263.68	18,425,642.78	4,899,970.95
	PDRB	27,290,945.61	28,880,686.20	30,753,674.05
	Share (%) :			
1	Primer	21.27	20.55	20.14
2	Sekunder	15.56	15.65	15.45
3	Tersier	63.17	63.80	64.41
	PDRB	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Bali

Dari nilai tambah riil yang tercipta di Bali di Tahun 2011, paling besar di disumbangkan oleh sektor Tersier yakni hampir 65 persen dari total PDRB. Sektor tersier mengalami kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun yakni dari 63,18 persen di tahun 2009 menjadi 63,80 persen di tahun 2010 dan yang terakhir di tahun 2011 mencapai 64,41 persen (lihat **Tabel 4.4**)

4.2. Pembangunan Ekonomi Daerah dan Indeks *Location Quotient*

Dalam teori pembangunan ekonomi daerah (*local economic development*) telah dikenal paling sedikit terdapat sepuluh teori. Teori-teori pembangunan ekonomi daerah ini dirangkum oleh *Maliza dan Feser (1999)*, seperti tampak pada **Tabel 4.5**. Sepuluh teori tersebut sesungguhnya telah populer di kalangan pakar ekonomi regional (*regional*

economist) dan *regional planner* di Indonesia. Sedikit banyak teori-teori tersebut pernah diterapkan di Indonesia dalam kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi masa orde baru dengan basis wilayah (*regionalisasi*) berupa provinsi atau gabungan provinsi (*Wilayah Pembangunan Utama/WPU*). Penggunaan basis wilayah provinsi atau gabungan provinsi memang dimungkinkan dalam mekanisme dekonsentrasi ketika itu. Disamping itu, pernah pula menerapkan teori pembangunan ekonomi daerah berbasis wilayah gabungan kota dan kabupaten yang berciri "Nodalitas" yang disebut dengan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Hanya saja penerapannya tidak secara utuh memilih satu teori atau kombinasi dari berbagai teori, dan dalam rencana aksinya (*action plan*) lebih didasarkan pada persepsi kebutuhan daerah dan bukan pada realitas kebutuhan serta potensi daerah.

Bukan rahasia lagi bahwa pola perkembangan ekonomi nasional tidak terfokus, sehingga berimbas pada pengembangan ekonomi daerah yang juga tidak terfokus. Tidak terfokusnya pengembangan ekonomi nasional maupun pembangunan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan institusi, baik pergeseran dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi maupun pergeseran fungsi-fungsi pada institusi pemerintahan pusat. Selain itu, juga diwarnai oleh munculnya paradigma-paradigma baru yang dianggap sebagai solusi, seperti misalnya pendekatan partisipatif, *pro-bottom up planning*, *rural-urban linkages*, program pengentasan kemiskinan, *good governance*,

pengembangan UMKM, serta pendekatan investasi dan kereksadanaan (obligasi, *borrowing system*, sekuritisasi aset) dan lain sebagainya.

TABEL 4.5.
Ringkasan Teori *Local Economic Development*

No	Teori	Dasar Teori	Dasar Pengembangan	Sasaran Pengembangan
1	<i>Economic Based Theory</i>	Ekspor Barang (komoditas)	Peningkatan laju pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan	Mereson permintaan luar negeri dan multiplier effect
2	<i>Staple Theory</i>	Industri berorientasi ekspor	Ekspor merupakan kunci pertumbuhan ekonomi	Peranan modal asing untuk melayani kebutuhan pasar internasional
3	<i>Sector Theory</i>	Pengembangan semua sektor ekonomi baik primer, sekunder, maupun tersier	Pengembangan aneka ragam sektor dan peningkatan produktivitas sektor	Peningkatan sektor akan meningkatkan kebutuhan dan pendapatan sektor
4	<i>Growth Pole Theory</i>	Industri	Industri yang bahan bakunya berasal dari daerah lain sehingga pertumbuhan industri semacam ini selain mendorong ekonomi lokasi industri juga mampu meneteskan pertumbuhan ekonomi daerah lain	Lokasi industri (<i>propulsive industry</i>) merupakan kutup pertumbuhan (<i>growth pole</i>)
5	<i>Regional Concentration and Diffusion Theory</i>	Perdagangan antar daerah dan antar industri	Peningkatan pendapatan per kapita	Spread and back-wash effect (Myrdal) atau terjadinya penyetanan perkembangan dan efek polarisasi (Hirschman)
6	<i>Newclassical Growth Theory</i>	Agregat ekonomi wilayah	Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi per kapita	Peningkatan tabungan untuk mendukung investasi dan pembentukan modal
7	<i>Interregional Trade Theory</i>	Faktor harga dan kuantitas komoditi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi	Penyesuaian harga akan memberikan keseimbangan pada harga, kualitas, dan efek-efek lainnya
8	<i>Product Cycle Theory</i>	Produk baru akan maturing kemudian usang	Kreasi baru akan terus muncul	Produk baru dan inovasi
9	<i>Enterprenership Theory</i>	Fungsi dan peranan pengusaha	Ketahanan dan diversifikasi	Proses inovasi
10	<i>Flexible Specialization Theory</i>	Struktur industri	Pembangunan berkelanjutan melalui produk-produk baru, inovasi, dan spesialisasi	Mengikuti pola permintaan dan fleksibel

Sumber: Maliza dan Feser, 1999

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melihat dan mengidentifikasi lapangan usaha/sector ekonomi unggulan, serta menganalisis perkembangan sector-sector ekonomi di daerah, khususnya di Provinsi Bali, terhadap sector-sector yang sama pada tingkat nasional adalah melalui metode ***Location Quotient (LQ)***. Alur kerangka pemikirannya dapat dilihat pada **Gambar 4.2**.

Metode LQ merupakan suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dan didasarkan pada teori model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sector kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. LQ mengukur dan menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sector di suatu region (kabupaten/kota/provinsi) terhadap sumbangan nilai tambah sector yang bersangkutan secara provinsi/nasional atau menghitung perbandingan antara *share output* suatu sector di kabupaten/kota terhadap *share output* suatu sector di provinsi.

Inti dari model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah. Ekspor itu sendiri tidak terbatas pada bentuk barang-barang dan jasa, akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing (wisman) yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak (Budiharsono, 2001, Hendayana, 2003:2-4, dan Tarigan, 2005:82-85).

Teori

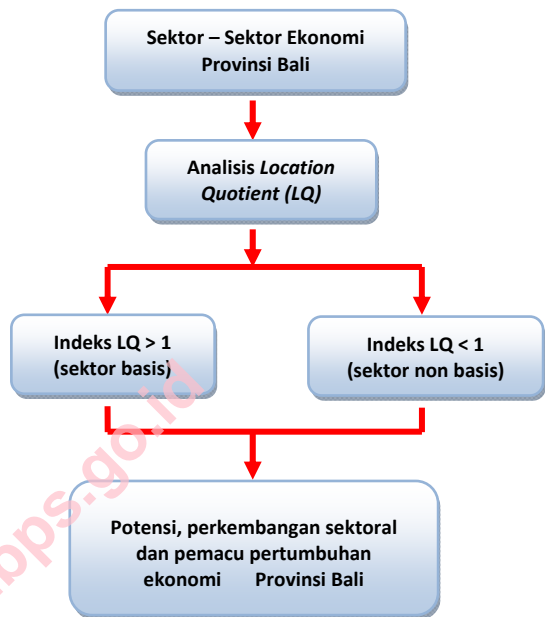
ekonomi basis mengklarifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor, yakni sektor basis dan sektor non basis.

Dijelaskan oleh Rusastra, dkk (2002) dalam Hendayana

(2003:2-4) bahwa yang dimaksud kegiatan basis merupakan kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa ditujukan untuk ekspor ke luar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional.

Konsep efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomis sangat menentukan dalam pertumbuhan basis suatu wilayah. Sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan masyarakat yang hasilnya baik berupa barang atau jasa diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Konsep swasembada, mandiri, kesejahteraan dan kualitas hidup sangat menentukan dalam kegiatan non basis ini.

GAMBAR 4.2.
Kerangka Pemikiran
Analisis Location Quotient Provinsi Bali



Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai *leading sector* suatu kegiatan ekonomi. Dasar pembahasannya sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan nilai tambah/tingkat pendapatan (PDB/PDRB). Dalam prakteknya, penggunaan melalui pendekatan LQ ini meluas tidak terbatas pada bahasan ekonomi saja, akan tetapi juga dimanfaatkan untuk menentukan sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah berdasarkan potensinya. Dalam analisis LQ, ekonomi diasumsikan tertutup. Dengan demikian, hasilnya hanya dapat digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi, tidak dapat digunakan untuk proyeksi ke depan.

Ada beberapa keunggulan dari metode LQ, antara lain metode LQ memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung, metode LQ sederhana dan tidak mahal, serta dapat diterapkan pada data historik untuk mengetahui *trend*. Kendati begitu, metode LQ juga tak luput dari beberapa kelemahan, antara lain berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah adalah identik dengan pola permintaan negara/bangsa, bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor regional adalah sama dengan produktivitas tiap pekerja dalam industri-industri nasional, serta tingkat ekspor tergantung pada tingkat disagregasi.

Secara matematis, penghitungan LQ yang didasarkan pada nilai tambah/tingkat pendapatan (PDB/PDRB) dirumuskan sebagai berikut (Budiharsono, 2001; Hendayana, 2003; dan Tarigan, 2005:82).

$$LQ = \frac{X_{in}/Y_n}{X_i/Y}$$

Keterangan:

LQ : Location Quotient
X_{in} : Nilai Tambah sektor i di Provinsi Bali
Y_n : Total PDRB Provinsi Bali
X_i : Nilai Tambah sektor i di Indonesia
Y : Total PDB Indonesia

Sebagai interpretasi dapat dijelaskan di sini bahwa indeks LQ yang diperoleh akan berada dalam kisaran lebih kecil atau sama dengan satu hingga lebih besar dari angka satu ($1 \geq LQ > 1$). Besaran indeks LQ menunjukkan besaran derajat spesialisasi atau konsentrasi dari sektor itu di wilayah yang bersangkutan --- dalam hal ini Provinsi Bali --- relatif terhadap wilayah referensi (Indonesia). Artinya, semakin besar indeks LQ di suatu wilayah, maka akan semakin besar pula derajat konsentrasinya di wilayah tersebut. Hasil penghitungan LQ menghasilkan tiga kriteria sebagai berikut.

1. Jika $LQ > 1$ bermakna bahwa sektor i tersebut menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas di sektor i tersebut memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*), hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan, tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah. Dengan kata lain, sektor tersebut merupakan sektor yang “kuat”,

sehingga daerah bersangkutan secara potensial merupakan pengeksport produk dari sektor tersebut ke daerah lain atau sektor tersebut memiliki prospek yang menguntungkan untuk dikembangkan.

2. Jika $LQ = 1$ bermakna bahwa sektor i tergolong non basis. Komoditas pada sektor i tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.
3. Jika $LQ < 1$ bermakna bahwa sektor i juga termasuk non basis. Produksi komoditas pada sektor i di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga perlu pasokan atau impor dari luar. Dengan kata lain, suatu sektor tersebut kurang menguntungkan untuk dikembangkan dan belum mampu memenuhi semua permintaan dari dalam daerah, sehingga harus didatangkan dari daerah lain.

LQ suatu sektor akan naik apabila (i) pangsa sektor tersebut terhadap total PDRB daerah naik, sementara pangsa sektor yang sama di tingkat nasional tetap; (ii) pangsa sektor tersebut terhadap PDRB daerah tetap dan pangsa sektor yang sama di tingkat nasional turun; (iii) pangsa sektor tersebut di daerah terhadap sektor yang sama di tingkat nasional naik, sementara pangsa total PDRB daerah terhadap PDB nasional tetap; dan (iv) pangsa suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama di tingkat

nasional tetap, sementara pangsa total PDRB daerah terhadap PDB nasional turun.

Suatu sektor yang menghasilkan indeks LQ > 1 merupakan standar normatif untuk ditetapkan sebagai sektor unggulan. Kendati demikian, ketika banyak sektor di suatu wilayah yang menghasilkan indeks LQ > 1, sementara yang dicari hanya satu saja, maka yang harus dipilih adalah sektor yang mendapatkan indeks LQ paling tinggi. Karena indeks LQ yang semakin tinggi di suatu wilayah menunjukkan semakin tinggi pula potensi keunggulan sektor tersebut.

TABEL 4.6.
Indeks Location Quotient Provinsi Bali Berdasarkan Data PDRB Provinsi Bali dan PDB Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2011

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	Rata-rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Pertanian	1.23	1.18	1.18	1.20
2	Pertambangan dan Penggalian	0.06	0.06	0.06	0.06
3	Industri Pengolahan	0.35	0.37	0.37	0.36
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.32	2.48	2.59	2.46
5	Bangunan	0.46	0.44	0.46	0.45
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.23	2.19	2.23	2.22
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.15	2.20	2.19	2.18
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.97	0.94	0.93	0.95
9	Jasa-jasa	1.42	1.40	1.38	1.40

Sumber : BPS Provinsi Bali

Dalam bahasan ini akan dilihat indeks LQ di Provinsi Bali didasarkan pada data PDRB dan PDB atas dasar harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha selama periode tahun 2009 - 2011. Berdasarkan hasil penghitungan,

seperti dapat dilihat pada **Tabel 4.6** di atas, secara rata-rata terdapat lima sektor ekonomi yang dihitung berdasarkan data PDRB/PDB atas dasar harga berlaku di Provinsi Bali yang mempunyai indeks LQ > 1 selama periode tahun 2009 - 2011. Kelima sektor itu adalah listrik, gas dan air bersih (LQ=2,46); perdagangan, hotel dan restoran (LQ = 2,22); pengangkutan dan komunikasi (LQ = 2,18); jasa-jasa (LQ=1,40) dan pertanian (LQ = 1,20).

Dengan kata lain, selama periode tersebut, kelima sektor tadi menjadi sektor basis atau menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berperan kuat, dan memiliki prospek yang menguntungkan untuk dikembangkan di Provinsi Bali. Karena kelima sektor tadi lebih spesialis di Provinsi Bali dari pada sektor yang sama di Indonesia, disamping sebagai motor penggerak dan daya dukung bagi ekonomi Bali yang bersandarkan pada industri pariwisata.

Tingginya indeks LQ sektor LGA ini tak terlepas dari peningkatan kebutuhan dan permintaan sumber daya energi listrik dan air bersih yang tinggi terhadap dunia usaha dan bisnis yang bergerak di industri pariwisata, di samping pemenuhan kebutuhan bagi rumah tangga dan penduduk di Bali.

Hal tersebut disebabkan karena listrik diperlukan oleh hampir semua sisi kehidupan manusia, baik di lingkungan keluarga, perkantoran, dunia usaha maupun dunia industri.

Prioritas pembangunan yang menjadi andalan Bali adalah pariwisata, industri kecil (UMKM) dan pertanian

dalam arti luas yang semuanya sangat memerlukan sistem kelistrikan yang memadai. Artinya, listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi hajat hidup masyarakat Bali. Sistem kelistrikan di Bali saat ini disuplai atau dipasok dari empat sumber energi, yakni: (1) sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) melalui kabel bawah laut sebesar 220 MW; (2) PLTG Gilimanuk sebesar 133,8 MW; (3) PLTGU Pamaron, Singaraja-Buleleng sebesar 96 MW; dan (4) unit pembangkit PLTD/PLTG Pesanggaran, Denpasar sebesar 200,82 MW (Dharma Putra, 2010).

Dari **Tabel 1 Lampiran**, dapat dilihat bahwa nilai tambah yang dihasilkan oleh sub sektor listrik mencapai 1,12 triliun rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan 14,13 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sebesar 0,98 triliun rupiah. Peningkatan ini tidak terlepas dari program-program yang sukses digalakkan oleh PLN Distribusi Bali di tahun 2011 yang salah satunya adalah program “Go Grass”.

Program Gerakan Sehari Sejuta Sambungan Listrik ini menargetkan pemasangan pada 9500 pelanggan baru di Bali, namun ternyata hasilnya melebihi target yakni sebanyak 11.800 pelanggan. Sedangkan program Go Grass tahap pertama telah berlangsung sejak Oktober 2010 tahun lalu dimana saat itu berhasil melayani 40.707 pelanggan baru.

Sementara itu, pada sub sektor air bersih di Bali, nilai tambah yang tercipta secara nominal mencapai Rp 305.811,85 juta di tahun 2011 atau meningkat 9,76

persen dari tahun 2010 yang mencapai Rp 278.629,24 juta. Kendati nilai tambah yang tercipta meningkat, namun *share* yang diberikan sub sektor ini terhadap total PDRB Bali relatif kecil dan stagnan di kisaran 0,42 persen dalam setahun terakhir ini.

Secara kuantitas potensi air bersih semakin berkurang setiap tahun, karena berkurangnya sumber air baku yang disebabkan oleh mengecilnya debit dan menurunnya kualitas air oleh adanya pencemaran. Berkurangnya cadangan air tanah diakibatkan oleh pengambilan yang melampaui kemampuannya, sehingga

GAMBAR 4.3.

Lima Sektor Ekonomi dengan Rata-Rata Indeks LQ > 1 pada Harga Berlaku di Provinsi Bali Selama Periode Tahun 2009 – 2011



potensi air tanah menjadi menurun. Selain itu, kawasan terbuka hijau semakin hari semakin mengecil yang diikuti

alih fungsi lahan dari kawasan resapan air menjadi kawasan terbangun.

Potensi sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dalam perekonomian Bali selama periode tahun 2009 - 2011 mempunyai indeks LQ > 1, sehingga secara umum sektor ini dapat digolongkan sebagai sektor basis. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor PHR merupakan salah satu sektor spesialis dan unggulan yang mampu memberikan kontribusi sangat besar dalam menunjang aktivitas kepariwisataan dan perekonomian secara umum di Bali.

Demikian halnya potensi pada sektor transportasi (pengangkutan dan komunikasi) dalam perekonomian Bali selama periode tahun 2009 –2011 mempunyai indeks LQ > 1, sehingga sektor ini pun digolongkan sebagai sektor basis. Artinya, sektor ini memiliki peranan yang kuat dalam memacu pertumbuhan ekonomi Bali. Ketersediaan infrastruktur transportasi seperti angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan, angkutan udara dan jasa penunjang angkutan, serta pos, komunikasi dan jasa penunjang komunikasi yang memadai di Bali menjadi barometer penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan pariwisata Bali.

Selama periode tahun 2009 -2011, perkembangan indeks LQ sektor pengangkutan dan komunikasi cenderung meningkat, dari 2,15 di tahun 2009 menjadi 2,19 di tahun 2011. Secara rata-rata dalam periode tersebut, indeks LQ sektor ini mencapai angka 2,18. Sektor yang juga memiliki indeks LQ > 1 di Bali adalah sektor jasa-jasa, sehingga sektor

ini juga tergolong sebagai sektor basis. Yang termasuk dalam sektor jasa-jasa ini adalah jasa pemerintahan umum dan jasa swasta (sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi, serta perorangan dan rumahtangga). Perkembangan indeks LQ pada sektor jasa-jasa cenderung menurun selama periode tahun 2009-2011. Kalau pada tahun 2009, indeks LQ sektor ini sebesar 1,42 namun menurun pada tahun 2011 sebesar 1,38. Secara rata-rata dalam periode tersebut, indeks LQ sektor jasa-jasa mencapai angka 1,40.

Hal menarik bila dilihat perkembangan indeks LQ pada sektor pertanian selama periode tahun 2009 - 2011. Kendati sektor pertanian di Bali termasuk ke dalam sektor basis yang ditunjukkan dari indeks LQ > 1, namun pergerakan indeks LQ sektor ini berangsur-angsur turun dalam tiga tahun terakhir. Kalau pada tahun 2009, indeks LQ sektor pertanian mencapai 1,23 namun di tahun 2011 indeks LQ hanya 1,18, dengan rata-rata mencapai angka 1,20 selama periode tersebut. Di tengah menurunnya *share* sektor pertanian terhadap PDRB Bali yang kini tinggal 17,34 persen di tahun 2011.

Masih berdasarkan pada **Tabel 4.6**, secara rata-rata terdapat empat sektor ekonomi yang dihitung berdasarkan data PDRB/PDB atas dasar harga berlaku di Provinsi Bali yang mempunyai indeks LQ < 1 selama periode tahun 2009 - 2011. Keempat sektor itu adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (LQ = 0,95); bangunan (LQ = 0,45); industri pengolahan (LQ = 0,36); serta pertambangan

dan penggalian (LQ = 0,06). Dengan kata lain, selama periode tersebut, keempat sektor tadi merupakan sektor non basis. Keempat sektor tersebut dapat dikatakan semakin melemah dalam derajat keunggulan relatifnya terhadap sektor-sektor yang sama pada level nasional.

TABEL 4.7.
Indeks Location Quotient Provinsi Bali Berdasarkan Data PDRB Provinsi Bali dan PDB Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2011

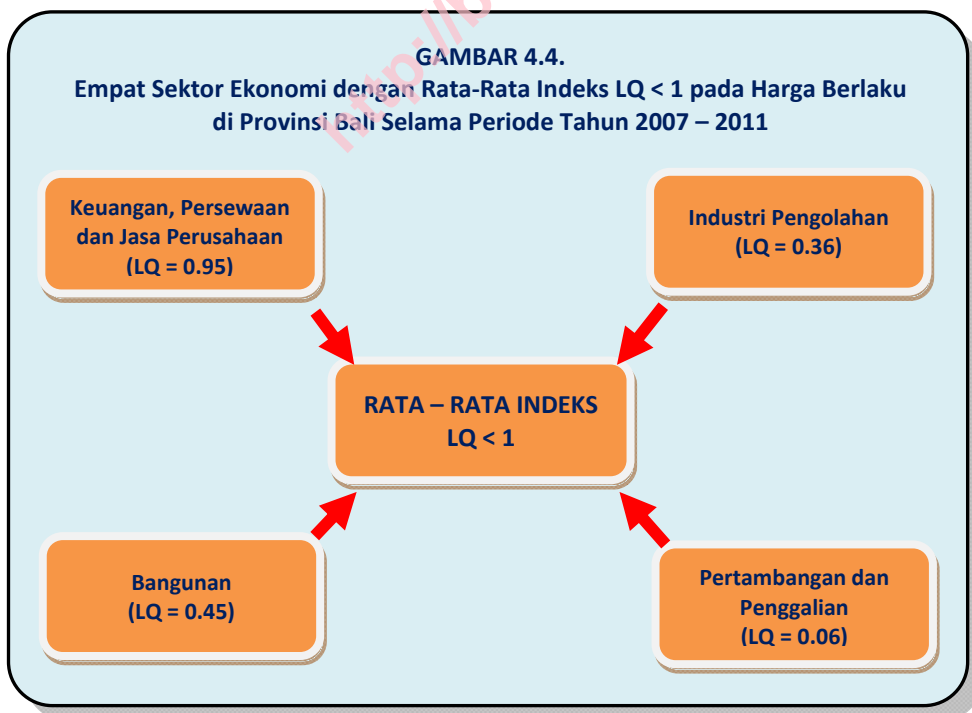
No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	Rata-rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Pertanian	1.52	1.51	1.50	1.51
2	Pertambangan dan Penggalian	0.07	0.08	0.09	0.08
3	Industri Pengolahan	0.39	0.39	0.38	0.39
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.02	1.94	2.00	1.32
5	Bangunan	0.61	0.61	0.62	0.61
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.88	1.84	1.83	1.85
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.25	1.17	1.12	1.18
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.72	0.74	0.74	0.73
9	Jasa-jasa	1.43	1.47	1.51	1.47

Sumber : BPS Provinsi Bali

Tidak berbeda dengan penghitungan indeks LQ yang diukur berdasarkan PDRB dan PDB atas dasar harga berlaku, maka hal yang sama juga diperlihatkan pada indeks LQ yang dihitung berdasarkan data PDRB/PDB atas dasar harga konstan (riil), seperti tampak pada **Tabel 4.7**, di mana kelima sektor memiliki rata-rata indeks LQ > 1, yakni perdagangan, hotel dan restoran (LQ = 1,85); pertanian (LQ = 1,51); jasa-jasa (LQ = 1,47); sektor listrik, gas dan air bersih (LQ = 1,32); serta pengangkutan dan komunikasi (LQ = 1,18). Dalam

konteks ini dapat dijelaskan bahwa rata-rata laju pertumbuhan kelima sektor tersebut di Bali lebih besar daripada laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian pada tingkat nasional. Dengan demikian, kelima sektor tadi merupakan basis ekonomi yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Bali.

Sebaliknya, juga terdapat empat sektor yang memiliki indeks $LQ < 1$ atas dasar harga konstan, yakni sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ($LQ = 0,73$); bangunan ($LQ = 0,61$); industri pengolahan ($LQ = 0,39$); serta pertambangan dan penggalian ($LQ = 0,08$). Dengan demikian, keempat sektor tadi bukan merupakan basis ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk dikembangkan di Bali.



Pengukuran potensi dan sektor unggulan di Bali melalui pendekatan metode indeks LQ bukanlah satu-satunya indikator yang bisa menjawab tuntas tantangan dan permasalahan yang ada dalam perekonomian Bali itu sendiri. Sudah tentu masih banyak pendekatan metodologi atau teknik statistik yang lainnya. Kendati begitu, melalui indeks LQ ini setidaknya dapat diketahui mana-mana saja sektor yang mampu berperan, dan sebagai basis ekonomi dalam memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali selama periode tahun 2009 – 2011. Selain itu, melalui indeks LQ ini juga dapat mengenali investasi yang kurang tepat pada sektor tertentu, sehingga baik investor maupun pemerintah daerah Bali dapat menganalisis dan mengambil kebijakan atau tindakan yang sesuai.

Bila dicermati dari kupasan analisis indeks LQ tadi terungkap fenomena menarik yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

1. Sektor-sektor yang memiliki indeks LQ > 1 di Bali merupakan sektor-sektor ekonomi yang sangat berkaitan erat dengan pembangunan kepariwisataan Bali secara khusus dan pembangunan perekonomian Bali secara umum. Sebagai contoh, sektor listrik, gas dan air bersih (LGA) merupakan sektor ekonomi basis yang potensial, karena merupakan hal yang sangat strategis dan vital terhadap kegiatan hidup dan aktivitas perekonomian sehari-hari.

Demikian pula halnya dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan

komunikasi, serta jasa-jasa. Pesatnya perkembangan dan penggunaan LGA di Bali menunjukkan bahwa pada saat ini perlu dikembangkan industri energi alternatif yang ramah lingkungan, yakni energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dibicarakan pada Kongres PBB untuk Perubahan Iklim di Bali, 3 – 14 Desember 2007 lalu.

2. Sektor pertanian dalam arti luas di Bali harus mampu ditingkatkan agar Bali dapat swasembada dan mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga akan membantu dan menunjang, serta mensinergikan dengan sektor lainnya termasuk industri pariwisata.
3. Pada sektor pertambangan dan penggalian di Bali yang mempunyai indeks LQ terendah mencerminkan bahwa filosofi Tri Hita Karana masih menyatu bagi masyarakat Bali, sehingga usaha pertambangan dan penggalian, khususnya subsektor penggalian (Galian C) yang tidak ramah lingkungan akan banyak mendapat reaksi keras dari masyarakatnya.

Sub sektor penggalian merupakan subsektor yang paling tidak sesuai untuk dikembangkan di Bali. Banyak tanah di Bali merupakan tanah adat, yang dianggap suci dan tidak begitu saja bisa dialih-fungsikan menjadi usaha penggalian, yang kebanyakan akan menyebabkan kerusakan lingkungan apabila dieksploitasi secara besar-besaran dan tidak sesuai dengan tatanan ruang kota di masing-masing kabupaten/kota di Bali.

4. Indeks LQ pada sektor industri pengolahan ternyata di bawah satu, bahkan lebih rendah dari indeks LQ sektor bangunan. Bila usaha kerajinan dan usaha kecil (*home industry*) termasuk didalamnya, maka ini menandakan bahwa potensi yang ada pada sektor industri pengolahan harus terus dikembangkan dan ditingkatkan.
5. Bisa saja sektor-sektor yang memiliki indeks LQ yang rendah (dibawah satu) diakibatkan oleh inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi di sektor usaha tertentu, dan bisa dimungkinkan karena kesalahan investasi atau kurangnya sumberdaya dan infrastruktur yang ada.

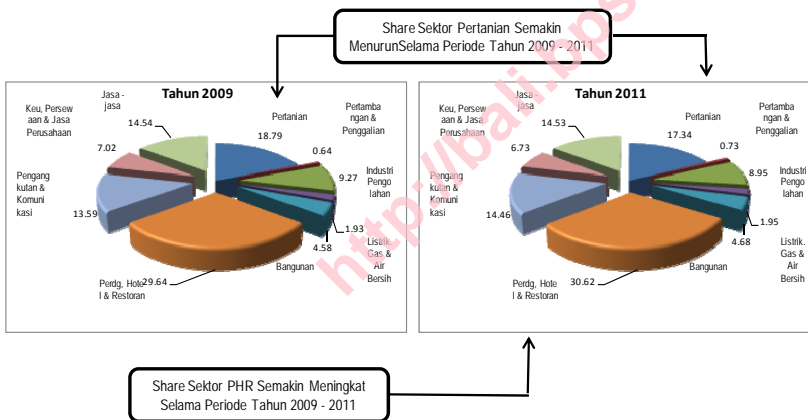
4.3. Struktur Perekonomian Bali

Struktur perekonomian di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari komposisi seluruh kegiatan produksi yang terjadi di daerah/wilayah tersebut. Perubahan struktur ekonomi pada suatu daerah/wilayah tergantung pada komposisi masing – masing sektor produksi. Jika terjadi pergeseran dalam komposisi masing - masing sektor, maka struktur perekonomiannya juga akan berubah. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengamati struktur perekonomian suatu daerah/wilayah adalah distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, yang juga dapat digunakan untuk mengamati keunggulan atau potensi daerah/wilayah bersangkutan.

Dalam hal Provinsi Bali, struktur perekonomian yang dibangun sangat spesifik dan mempunyai karakteristik

tersendiri dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Spesifik perekonomian Bali itu dibangun dengan mengandalkan industri pariwisata sebagai *leading sector*, yang mampu mendorong terjadinya suatu perubahan struktur. Selama periode tahun 2009 - 2011, struktur perekonomian Bali tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Kendati begitu, patut disimak adalah terus menurunnya *share* sektor pertanian terhadap PDRB Bali selama periode tersebut.

GAMBAR 4.5.
Kontribusi PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Bali



Sumber : BPS Provinsi Bali

Sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 4.5**, *share* sektor pertanian di Bali pada tahun 2009 mencapai angka 18,79 persen, namun di tahun 2011 *share* itu tinggal 17,34 persen. Sekalipun nilai tambah bruto yang tercipta sektor ini mengalami kenaikan, dari Rp 11,33 trilyun di tahun 2009 menjadi Rp 12,74 trilyun di tahun 2011. Barangkali fenomena ini sejalan dengan dinamika pembangunan yang tengah berjalan, baik dalam konteks nasional maupun

dalam konteks pembangunan daerah Bali, yang menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi dengan diikuti perubahan struktur ekonomi dari pertanian menuju industri atau jasa-jasa, serta perubahan dalam kelembagaan baik melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri.

Selain itu, pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional dan daerah, akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke sektor modern yang didominasi oleh sektor-sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa-jasa) dengan *increasing returns to scale* (korelasi positif antara pertumbuhan output dengan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, terdapat suatu korelasi yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan struktur ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat (*income side effect*).

Kecenderungan menurunnya *share* sektor pertanian harus disikapi secara lebih serius. Hal ini karena sektor pertanian tidak saja terkait dengan pemenuhan konsumsi domestik, namun juga terkait erat dengan kondisi kepariwisataan Bali. Bisa jadi pula struktur perekonomian Bali yang tak didukung dengan pertanian yang kuat akan hancur. Gejala ini ditunjukkan Bali sangat tergantung pada daerah lain dalam menyediakan berbagai komoditi pertanian. Ini sangat ironis jika melihat hampir 30 persen masyarakat Bali bekerja di sektor pertanian.

Sangat ironis memang jika dilihat bahwa lahan pertanian di Bali banyak yang di alih fungsikan menjadi lahan non pertanian. Adanya alih fungsi lahan pertanian (lahan sawah) ke lahan bukan pertanian di Bali berimplikasi sangat serius terhadap produksi pangan. Selain itu, berdampak pada lingkungan fisik, adat dan budaya. Sementara jumlah penduduk yang semakin banyak menyebabkan tekanan peningkatan terhadap pemanfaatan lahan pertanian makin meningkat. Kondisi ini menyebabkan makin banyaknya petani gurem. Belum lagi dihadapkan persaingan pemanfaatan lahan antar sektor pertanian dengan lahan bukan pertanian. Jika patokannya pada nilai sewa tanah, akhirnya pertanian akan selalu dikalahkan oleh peruntukan seperti perumahan dan industri. Karena banyak orang menganggap nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor properti jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Karena itu, Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan tanaman pangan berkelanjutan menjadi kian penting dalam mengerem laju alih fungsi lahan.

Barangkali jika ada bencana alam kemudian Pelabuhan Gilimanuk maupun Padangbai ditutup dua hari saja, Bali akan kerepotan untuk mendapatkan pasokan komoditi pertanian. Kalaupun ada, harganya dipastikan akan naik. Belum lagi perilaku konsumen yang memborong komoditi tertentu jika sudah melihat perkembangan pasar tidak wajar. Lanjutannya, harga akan tergerak naik dan akan mendorong naiknya inflasi. Karena itulah, revitalisasi

pertanian sangat strategis terkait upaya untuk meningkatkan struktur ekonomi dan daya saing produk pertanian Bali. Dengan revitalisasi pertanian yang kuat, Bali telah turut berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional dan global.

Pada konteks lain, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) tampil sebagai kontributor utama terhadap PDRB Bali. Sektor ini memiliki kecenderungan kontribusi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terbukti di tahun 2009 sektor ini memiliki *share* 29,64 persen, selanjutnya 30,01 persen di tahun 2010 dan 30,62 persen di tahun 2011. Membaiknya pariwisata Bali yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisman, tingkat hunian hotel maupun aktivitas ekonomi lainnya sangat mendukung bagi kenaikan *share* di sektor PHR sepanjang tahun 2011. Pada tahun 2011, subsektor yang menjadi kontributor terhadap sektor PHR ini adalah subsektor perdagangan besar dan eceran (12,04%); hotel (9,96%); dan restoran (8,62%). Selengkapnya dapat disimak pada **Tabel 4.8**.

TABEL 4.8.

**Kontribusi PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2011 (dalam persen)**

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pertanian	18.79	18.14	17.34
2	Pertambangan dan Peggalian	0.64	0.70	0.73
3	Industri Pengolahan	9.27	9.18	8.95
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.93	1.89	1.95
5	Bangunan	4.58	4.55	4.68
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	29.64	30.01	30.62
7	Pengangkutan dan Komunikasi	13.59	14.44	14.46
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7.02	6.82	6.73
9	Jasa- jasa	14.54	14.27	14.53
PDRB		100.00	100.00	100.00

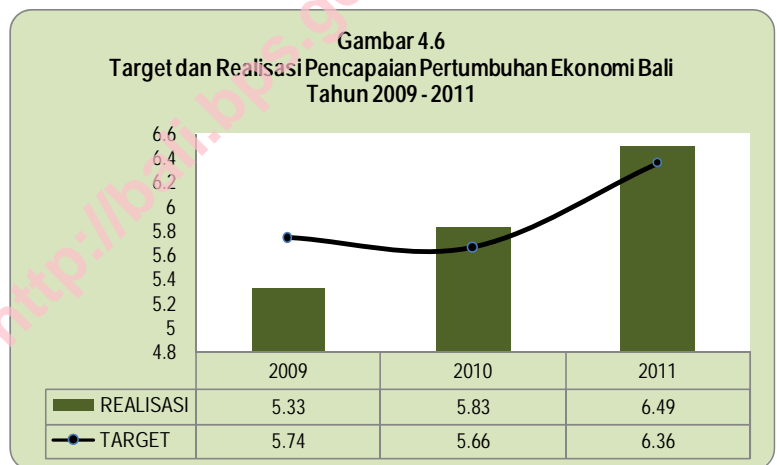
Sumber : BPS Provinsi Bali

4.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) --- yang juga dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi --- dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah, di samping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah/wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Di dalam pertumbuhan ekonomi tersirat adanya laju pertumbuhan berbagai macam sektor-sektor ekonomi yang ada.

Suatu daerah/wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil

(PDRB atas dasar harga konstan 2000) di daerah/wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah/wilayah, sehingga PBB dalam Dasa Warsa Pembangunan I (Development Decade I), yakni pada tahun 1960 – 1970 menetapkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen per tahun untuk jangka waktu yang lama sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.



Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah/wilayah.

Dalam konteks Bali, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2011 mencapai 6,49 persen. Angka ini relatif lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 6,46 persen.

Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2 tahun sebelumnya yakni tahun 2009 dan 2010. Dari sini, patut kiranya kinerja ekonomi Bali mendapatkan apresiasi di tengah situasi ekonomi global yang kurang menguntungkan

TABEL 4.9.
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 – 2011 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	Rata-rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Pertanian	5.68	1.76	2.23	3,22
2	Pertambangan dan Penggalian	5.27	19.43	10.51	11.73
3	Industri Pengolahan	5.43	6.08	3.12	4.88
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4.71	6.88	7.35	6.31
5	Bangunan	0.91	7.37	7.88	5.39
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.24	6.39	8.65	7.09
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5.09	5.77	5.97	5.61
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.63	7.47	6.22	5.44
9	Jasa-jasa	5.64	8.60	9.97	8.07
	PDRB	5.33	5.83	6.49	5.88

Sumber : RPS Provinsi Bali

Dilihat dari **Tabel 4.9**, sektor yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan laju pertumbuhan sebesar 11,73 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 8,07 persen dan kemudian di peringkat ketiga tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,09 persen.

Pemicu dari kenaikan laju pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian ini adalah pada subsektor

penggalan. Adanya kebijakan pemerintah kabupaten seperti di Kabupaten Karangasem yang menerbitkan ijin penggalan turut memacu peningkatan laju pertumbuhan sektor ini di Bali. Pemicu lainnya adalah tingginya permintaan akan bahan galian bagi pembangunan proyek atau infrastruktur di Bali sepanjang tahun 2011.

Sedangkan pada sektor jasa-jasa, kenaikan laju pertumbuhannya sangat berhubungan erat dengan bertambahnya jumlah wisman yang datang ke Bali, terutama pada subsektor jasa hiburan dan rekreasi. Sementara itu, laju pertumbuhan sektor-sektor pada kelompok sekunder bergerak naik selama tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada kelompok sektor berbasis sekunder, yakni sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; dan Bangunan mengalami kenaikan laju pertumbuhan di tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. Demikian pula halnya pada kelompok sektor berbasis tersier, di mana kecenderungan kenaikan laju pertumbuhan dialami sektor - sektor pada kelompok ini. Khusus pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan kontributor utama terhadap pembentukan PDRB Bali mampu tumbuh sebesar 8,65 persen di tahun 2011, nilai ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 6,39 persen. Sektor lain yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah Sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

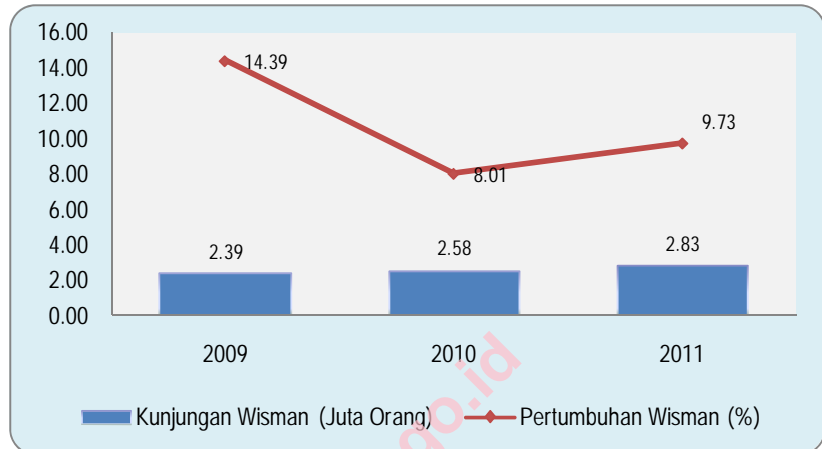
Lebih dari itu, masih merujuk **Tabel 4.9**, selama periode tahun 2009 – 2011, ternyata ada lima sektor yang

mempunyai rata-rata laju pertumbuhan di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 6,49 persen. Kelima sektor itu adalah pertambangan dan penggalian sebesar 10,51 persen; listrik, gas dan air sebesar 7,35 persen; bangunan sebesar 7,88 persen; perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,65 persen; dan jasa-jasa sebesar 9,97 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Bali tidak lepas dari pentingnya peranan industri pariwisata. Industri yang telah menggeser peranan sektor pertanian selama beberapa periode terakhir. Pariwisata sebagai *icon* perekonomian Bali mampu menunjukkan akselerasi yang baik sepanjang tahun 2011. Terbukti dari laju pertumbuhan sektor penyokong industri pariwisata yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa-jasa dan sektor listrik, gas dan air yang menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi yakni di atas 6 persen. Selain itu, dilihat dari **Gambar 4.8**, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumber pertumbuhan tertinggi diantara sektor lainnya yakni sebesar 2,76 persen.

Dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Bali, kedatangan langsung wisman ke Bali tahun ini ditargetkan 2,45 juta orang. Selama tahun 2011 jumlah wisman yang datang ke Bali mencapai 2,83 juta orang. Nilai ini sudah melampaui dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

GAMBAR 4.7.
Jumlah Kunjungan dan Pertumbuhan Wisman yang Datang ke Bali
Tahun 2009 – 2011



Dari **Gambar 4.7**, kedatangan wisman secara langsung ke Bali, baik melalui pelabuhan laut maupun udara, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dan memecahkan rekor kedatangan wisman selama beberapa dekade terakhir. Selama periode tahun 2009 – 2011, boleh dikatakan sebagai masa kebangkitan bagi industri pariwisata Bali, pasca terpuruk akibat ulah terorisme (tragedi bom) sebanyak dua kali. Dalam periode tersebut, kunjungan wisman ke Bali terus meningkat. Pada tahun 2009 tercatat 2,39 juta orang wisman mendarangi pulau seribu pura ini. Setahun kemudian terjadi kenaikan kunjungan wisman menjadi 2,58 juta orang. Sedangkan di tahun 2011 mencapai 2,83 juta orang. Sederetan angka tadi merupakan pencapaian tertinggi selama beberapa dekade terakhir ini.

Jika dilihat dari negara asal wisman, kontributor utama kunjungan wisman ke Bali selama periode tahun 2009-2011 didominasi oleh wisman asal Australia. Seperti dapat dilihat pada **Tabel 4.10**, jumlah kunjungan wisman asal Negeri Kanguru ini mencapai 446.570 orang di tahun 2009, setahun kemudian jumlah ini meningkat menjadi 641.979 orang, dan meningkat kembali menjadi 788.664 orang di tahun 2011.

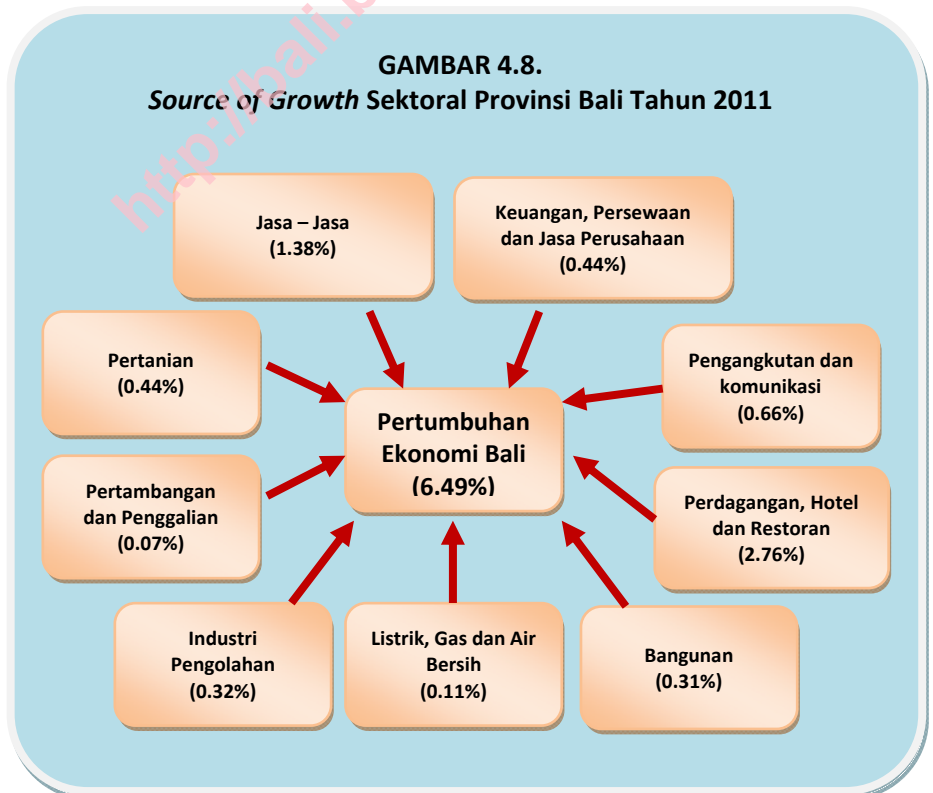
Republik Rakyat China (RRC) sebagai pasar baru kepariwisataan di Bali tercatat sebanyak 236.867 orang di tahun 2011 atau menempati peringkat kedua dari total kunjungan wisman ke Bali.

Peningkatan kunjungan wisman asal RRC telah menopang jumlah kunjungan wisman ke Bali pada dua tahun terakhir ini, di tengah lesunya wisman asal Jepang yang sebelumnya pernah mendominasi. Kondisi ini adalah suatu hal positif, mengingat ketergantungan pada hanya beberapa negara akan berakibat fatal jika terjadi sesuatu pada negara tersebut, sehingga pangsa wisman asal Australia yang makin mendominasi juga perlu diperhatikan, apalagi negara ini merupakan negara yang paling sensitif terhadap *travel warning* yang diberikan negaranya.

TABEL 4.10.
Sepuluh Negara Utama Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali
Tahun 2007 – 2011 (dalam satuan orang)

Peringkat Tahun 2011	Negara Wisman	2009	2010	2011
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Australia	446,570	641,979	788,664
2	Republik Rakyat Cina	206,151	196,925	236,867
3	Jepang	333,905	245,212	182,385
4	Malaysia	135,190	156,946	169,707
5	Taiwan	120,445	122,271	129,226
6	Korea Selatan	124,889	124,752	126,702
7	Perancis	113,453	104,142	111,491
8	Singapura	55,992	97,429	111,153
9	Inggris	93,588	96,536	102,989
10	Amerika Serikat	73,653	68,977	89,573
	Negara Lainnya	681,186	720,973	777,952
	Jumlah	2,385,122	2,576,142	2,826,709

Sumber : BPS Provinsi Bali

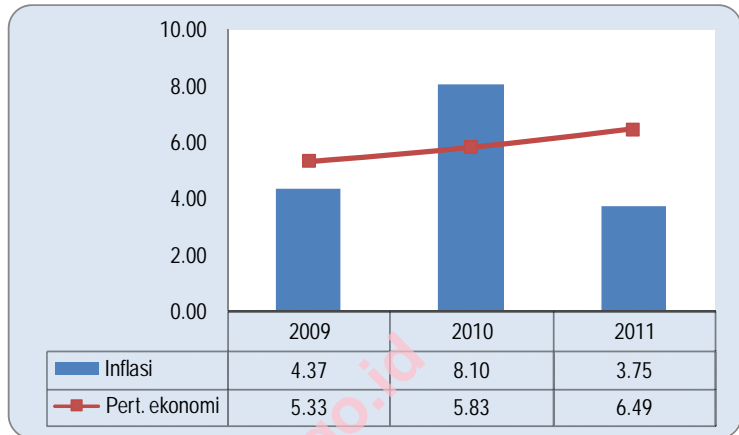


Kendati pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pertambangan dan penggalian, namun sektor tersebut bukan merupakan sumber pertumbuhan utama (*source of growth*), justru sumber pertumbuhan utama pada tahun 2011 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) sebesar 2,76 persen (**lihat Gambar 4.8**).

Kendati demikian, untuk mencermati kondisi ekonomi masyarakat secara riil perlu juga dicermati indikator lainnya seperti perkembangan harga barang dan jasa, Logikanya, kendati ekonomi tumbuh dan pendapatan meningkat, namun jika peningkatan pendapatan tidak mampu mengejar tingkat kenaikan harga barang dan jasa, maka dapat diartikan bahwa secara riil pendapatan masyarakat tersebut akan mengalami penurunan, Pada konteks ini, perkembangan perubahan harga barang dan jasa tersebut didekati dengan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) atau **Consumer Price Index (CPI)**, Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi,

Selama periode tahun 2009 – 2011, seperti tampak pada **Gambar 4.9**, perkembangan laju inflasi di Bali (Kota Denpasar) mengalami pasang surut, Selama periode tersebut, rata-rata laju inflasi di Bali mencapai 5,39 persen, Nilai tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali yang sebesar 5,88 persen,

GAMBAR 4.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Bali
Tahun 2009 – 2011 (dalam persen)



Inflasi Bali di tahun 2011 yang hanya 3,75 persen jauh menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 8,10 persen, Penurunan ini tentunya menggembirakan banyak pihak, karena turun nya inflasi ini menggambarkan kenaikan harga-harga secara umum di tahun 2011 tidak se dahsyat kenaikan harga-harga yang terjadi di tahun 2010, sehingga diharapkan kemampuan membeli konsumen juga meningkat di tahun ini, Selain itu, Inflasi di tahun 2011 ini jauh dari target yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bali yang mematok inflasi sebesar $5 \pm 1\%$.

Dua kontributor utama pemacu inflasi di Bali adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok sandang, Kelompok ini menyumbang inflasi masing-masing sebesar 6,30 persen, Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 4.11.

TABEL 4.11.
Laju Inflasi di Bali Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2009 – 2011
(dalam persen)

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun		
		2009	2010	2011
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Bahan Makanan	7.29	18.32	3.49
2	Makanan Jadi. Minuman. Rokok dan Tembakau	8.81	10.20	5.92
3	Perumahan. Air. Listrik. Gas dan Bahan Bakar	4.63	7.31	4.13
4	Sandang	3.59	2.92	6.23
5	Kesehatan	19.16	1.13	2.41
6	Pendidikan. Rekreasi dan Olahraga	-1.69	4.57	1.08
7	Transportasi. Komunikasi dan Jasa Keuangan	-2.89	0.25	2.39
Inflasi Bali (Denpasar)		4.37	8.10	8.75

Sumber : BPS Provinsi Bali

4.5. PDRB per Kapita Bali

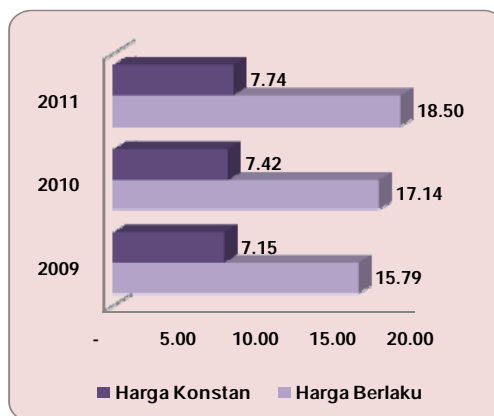
PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk. sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan.

Semakin besar nilai PDRB per kapita. maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati begitu. mesti diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata). sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan.

sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Namun apapun itu, data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah atau pun antar tahun.

PDRB Perkapita Bali di tahun 2011 tercatat sebesar 18.50 juta rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk di Bali menerima pendapatan sebesar 18.50 juta selama tahun 2011. Walaupun jumlah ini masih dibawah target yang ditetapkan KUA Provinsi Bali yakni Rp. 19.40 juta/tahun namun jumlah ini meningkat sebanyak 1.36 juta atau 7.93 persen dibandingkan tahun lalu. Jika dibandingkan tahun 2009, PDRB per kapita Bali atas dasar harga berlaku ini mengalami kenaikan 17.16 persen. Secara kasar dapat diartikan bahwa pendapatan yang diterima penduduk Bali meningkat di tahun 2011 ini.

GAMBAR 4.10.
PDRB Per Kapita Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011 (juta rupiah)



Selama periode tahun 2009 – 2011 rata-rata PDRB per kapita Bali atas dasar harga berlaku mencapai Rp 17,14 juta per tahun.

Pada sisi lain, PDRB per kapita Bali atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan sebesar 4,31 persen dari Rp 7,42 juta per tahun pada tahun 2010 menjadi Rp 7,74 juta per tahun pada tahun 2011. Namun laju peningkatan ini relatif masih lebih rendah dari laju peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Selama periode 2009 – 2011 rata-rata PDRB per kapita Bali atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 7,58 juta per tahun. Selengkapnya dapat disimak pada **Tabel 4.12**.

Dengan pertumbuhan ekonomi Bali 6,49 persen pada tahun 2011 dan pertumbuhan penduduk 2,07 persen per tahun, maka kenaikan PDRB per kapita Bali atas dasar harga berlaku sebesar 7,93 persen dan kenaikan PDRB per kapita Bali atas dasar konstan sebesar 4,31 persen di tahun 2011 dianggap masih baik karena produktivitas yang dicapai masih lebih baik dari ambang batas 3,68 persen. Angka ambang batas ini merupakan angka laju pertumbuhan ekonomi dikurangi angka laju pertumbuhan penduduk per tahun.

TABEL 4.12.
Indikator Agregatif PDRB Provinsi Bali Tahun 2009 – 2011

No	Indikator	Tahun		
		2009	2010	2011
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	PDRB Harga Berlaku (Juta Rp)	60,292,239.32	66,690,598.13	73,478,161.87
2	PDRB Harga Konstan (Juta Rp)	27,290,945.61	28,880,686.20	30,753,674.05
3	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	3,817,447	3,890,757	3,971,257
4	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Rp)	15,793,864.15	17,140,777.01	18,502,494.77
5	PDRB Per Kapita Harga Konstan (Rp)	7,149,004.46	7,422,896.42	7,744,065.43

Sumber : BPS Provinsi Bali

Besaran ini menunjukkan bahwa penduduk Bali tidak bertambah miskin secara rata-rata karena pertumbuhan PDRB per kapita jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Secara kasar, ukuran ini pun dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah hasil pembangunan yang dilakukan selama ini secara umum telah dapat meningkatkan “kue perekonomian” secara makro atau tidak. Dengan kata lain, dapat dilihat bagaimana penciptaan nilai tambah yang terjadi akibat proses pembangunan bila dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk di Bali.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.bps.go.id>

<http://bali.bps.go.id>

Bab V

P E N U T U P

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.bps.go.id>

Sebagai upaya perwujudan pembangunan Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera atau menuju “**Bali Mandara**”, maka keberlanjutan pembangunan di Bali harus ditopang dengan keterpaduan antar tiga pilar, yakni keberlanjutan pembangunan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Karena itu, mengikutsertakan penduduk Bali (*inclusive growth*) dalam memacu pertumbuhan ekonomi adalah suatu keharusan. Pembangunan yang terjadi juga mesti searah dengan pembangunan dalam skala nasional yang mengedepankan pada *pro growth, pro poor, dan pro job*.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga mesti tersebar ke seluruh daerah (kabupaten/kota), terutama dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai upaya mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah (kabupaten/kota). Sebab sejauh ini perekonomian Bali masih tertumpu pada sektor tersier (*services*), dan ada kecenderungan pembangunan lebih terkonsentrasi pada wilayah Bali bagian selatan meliputi Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

Pertumbuhan ekonomi Bali dalam setahun terakhir ini mengalami ekspansi mencapai 6,49 persen atau lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 5,83 persen, bahkan melewati dari target yang ditetapkan dalam KUA Bali 2010 sebesar 6,36 persen. Laju pertumbuhan ini di atas angka nasional yang sebesar 6,46 persen.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. *Berita Resmi Statistik Provinsi Bali*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, berbagai edisi dan terbitan.
- Anonim. 2010. *Berita Resmi Statistik Provinsi Bali*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, berbagai edisi dan terbitan.
- Anonim. 2009. *Data Strategis BPS*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Agustus.
- Anonim. 2011. *Bali Dalam Angka 2011*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Anonim. 2011. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi dan terbitan.
- Anonim. 2011. *Berita Resmi Statistik Provinsi Bali*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, berbagai edisi dan terbitan.
- Anonim. 2009. *Indonesia Economic Outlook 2010*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Anonim. 2009. *Nota Keuangan dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2009*. Jakarta: Kantor Kementerian Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Anonim. 2009. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2013*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali, 28 April 2009.

Anonim. 2010. *Bahan presentasi (slide) "Pembangunan Perekonomian Bali yang berkeadilan dalam Memperkuat Triple Track Strategy*, disampaikan dalam rangka rapat evaluasi pembangunan ekonomi Bali. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali – Tim Makro Ekonomi Bali.

Anonim. 2010. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi dan terbitan.

Anonim. 2010. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Juli.

Anonim. 2010. *Nota Keuangan dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010*. Jakarta: Kantor Kementerian Keuangan Departemen Keuangan RI.

Anonim. 2010. *Optimalisasi Sinergi: Meningkatkan Koordinasi Seluruh Stakeholders Ekonomi Bali*, dalam seminar "Perekonomian Bali Semester I-2010". Denpasar: Bank Indonesia Denpasar, Agustus.

Anonim. 2010. *Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUR RI ke-65 di depan sidang bersama DPR dan DPRD RI, 16 Agustus 2010*. Available from URL: <http://irtanindonesia.org>, di akses 5 Oktober 2010.

Anonim. 2011. *Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bali Tahun 2011*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali, 14 Januari.

Anonim. 2011. *Nota Keuangan dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2011*. Jakarta: Kantor Kementerian Keuangan Departemen Keuangan RI.

Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Penerbit PT Pradnya Paramita.

Dharma Putra, Ketut Gede. 2010. *Peluang dan Tantangan Bali Sebagai Provinsi Hijau/ Green Province. Perspektif Sistem Kelistrikan Bali*, disampaikan dalam seminar "Mewujudkan Sistem Kelistrikan Bali yang Mandiri dan Ramah Lingkungan Mendukung Program Bali Clean and Green" di Hotel Inna Bali. Denpasar: 24 Juni 2010. Available from URL: <http://kgdharmaputra.blogspot.com/2010/08/pencemaran-lingkungan-ancaman-masa.html>, di akses 4 Oktober 2010.

Dharma Putra, Ketut Gede. 2010. *Pencemaran Lingkungan Ancaman Masa Depan Bali*. Denpasar: Fakultas Matematika dan Ilmu

Djojohadikusumo, S.1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.

Hendayana, Rachmat. 2003. *Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional*. Media Informatika Pertanian Volume 12, Desember 2003. Bogor: Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Maliza and Feser. 1999. *Understanding Local Economic Development*, Center for Urban Policy Research, New Jersey.

Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.

<http://bali.bps.go.id>

<http://bali.bps.go.id>

<http://bali.bps.go.id>

LAMPIRAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://bali.bps.go.id>

Tabel 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI BALI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2011 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011 *
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	11,326,122.99	12,097,348.42	12,743,484.83
a. Tanaman Bahan Makanan	5,137,644.00	5,299,895.47	5656301.405
b. Tanaman Perkebunan	1,012,465.75	1,007,745.83	1071234.587
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	3,179,323.12	3,443,638.47	3558018.253
d. Kehutanan	5,464.98	4,779.58	5364.624162
e. Perikanan	1,991,225.15	2,341,289.07	2452565.965
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	387,916.96	466,486.73	539,564.45
a. Minyak dan Gas Bumi			
b. Pertambangan tanpa Migas			
c. Penggalian	387,916.96	466,486.73	539,564.45
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5,588,427.59	6,120,473.78	6,572,988.90
a. Industri Migas			
1. Pengilangan Minyak Bumi			
2. Gas Alam Cair			
b. Industri Tanpa Migas	5,588,427.59	6,120,473.78	6,572,988.90
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	1,122,604.87	1,304,263.02	1,386,338.02
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	2,331,037.21	2,403,840.48	2,602,091.23
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	1,144,427.57	1,162,690.34	1,206,439.97
4. Kertas dan Barang Cetak	99,436.12	102,915.86	119,371.06
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	536,167.72	691,310.85	759,647.70
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	64,420.32	73,269.22	79,890.36
7. Logam Dasar Besi & Baja			
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	190,750.97	271,195.96	293,705.02
9. Barang lainnya	99,582.81	110,988.04	125,505.53
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1,163,778.95	1,263,308.88	1,429,611.41
a. Listrik	907,212.82	984,679.64	1,123,799.56
b. Gas			
c. Air Bersih	256,566.13	278,629.24	305,811.85
5. BANGUNAN	2,760,100.13	3,033,986.71	3,440,423.58
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	17,868,607.67	20,016,062.16	22,499,946.97
a. Perdagangan Besar & Eceran	6,381,086.30	7,532,877.31	8,845,399.77
b. Hotel	6,204,279.76	6,655,489.56	7,317,896.37
c. Restoran	5,283,241.60	5,827,695.29	6,336,650.83
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	8,194,713.71	9,628,024.27	10,626,582.39
a. Pengangkutan	6,962,686.31	8,303,249.40	9,181,680.25
1. Angkutan Rel			
2. Angkutan Jalan Raya	1,694,242.85	1,994,738.26	2,181,645.07
3. Angkutan Laut	316,636.95	345,598.18	409,581.14
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	119,940.43	128,538.12	148,258.26
5. Angkutan Udara	3,862,610.26	4,805,518.56	5,350,455.85
6. Jasa Penunjang Angkutan	969,255.83	1,028,856.28	1,091,739.92
b. Komunikasi	1,232,027.40	1,324,774.87	1,444,902.14
1. Pos dan Telekomunikasi	1,175,312.16	1,251,683.36	1,366,461.21
2. Jasa Penunjang Komunikasi	56,715.24	73,091.51	78,440.93
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	4,234,063.20	4,548,558.14	4,946,582.66
a. Bank	1,277,733.71	1,402,194.98	1,581,591.10
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	384,994.27	401,622.06	438,284.24
c. Jasa Penunjang Keuangan	204,823.73	238,513.30	254,906.74
d. Sewa Bangunan	2,040,808.07	2,122,814.60	2,277,728.91
e. Jasa Perusahaan	325,703.42	383,413.20	394,071.68
9. JASA-JASA	8,768,508.14	9,516,349.04	10,678,976.68
a. Pemerintahan Umum	4,939,603.83	5,377,593.06	5,939,211.69
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	3,609,548.50	4,004,321.08	4,459,941.17
2. Jasa Pemerintah lainnya	1,330,055.33	1,373,271.98	1,479,270.52
b. Swasta	3,828,904.31	4,138,755.98	4,739,764.99
1. Sosial Kemasyarakatan	166,634.88	221,060.82	236,738.64
2. Hiburan & Rekreasi	209,002.54	230,664.08	246,585.81
3. Perorangan & Rumah tangga	3,453,266.88	3,687,031.07	4,256,440.54
PDRB DENGAN MIGAS	60,292,239.32	66,690,598.13	73,478,161.87
PDRB TANPA MIGAS	60,292,239.32	66,690,598.13	73,478,161.87

Catatan: *) Angka Sementara

Tabel 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI BALI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2011 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011 *
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	5,645,784.85	5,745,218.98	5,873,306.31
a. Tanaman Bahan Makanan	2,780,963.40	2,752,133.57	2,871,077.11
b. Tanaman Perkebunan	265,453.44	273,894.15	272,908.10
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,356,621.08	1,479,150.72	1,492,010.47
d. Kehutanan	2,144.38	2,354.48	2,526.63
e. Perikanan	1,240,602.55	1,237,686.07	1,234,783.99
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	157,971.73	188,664.53	208,488.02
a. Minyak dan Gas Bumi			
b. Pertambangan tanpa Migas			
c. Penggalian	157,971.73	188,664.53	208,488.02
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2,768,110.35	2,936,448.09	3,027,992.41
a. Industri Migas			
1. Pengilangan Minyak Bumi			
2. Gas Alam Cair			
b. Industri Tanpa Migas	2,768,110.35	2,936,448.09	3,027,992.41
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	560,166.73	583,606.00	581,430.16
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	1,135,440.71	1,202,040.98	1,256,172.14
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	589,938.00	614,003.92	614,432.02
4. Kertas dan Barang Cetak	46,531.79	46,828.64	53,632.06
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	273,152.30	307,036.94	325,660.52
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	25,929.48	30,541.84	32,167.19
7. Logam Dasar Besi & Baja			
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	103,443.83	115,130.14	123,527.51
9. Barang lainnya	33,507.52	37,259.64	40,970.81
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	410,371.98	438,590.34	470,830.61
a. Listrik	305,831.62	325,652.39	351,871.37
b. Gas			
c. Air Bersih	104,540.36	112,937.95	118,959.24
5. BANGUNAN	1,067,443.02	1,146,121.48	1,236,386.67
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	8,655,017.41	9,209,066.19	10,005,651.57
a. Perdagangan Besar & Eceran	3,228,170.66	3,546,069.68	3,957,875.20
b. Hotel	3,181,179.38	3,306,481.85	3,593,681.78
c. Restoran	2,246,667.37	2,356,514.66	2,454,094.59
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	3,016,617.21	3,190,556.74	3,380,964.69
a. Pengangkutan	2,479,828.60	2,617,393.55	2,761,458.99
1. Angkutan Rel			
2. Angkutan Jalan Raya	580,302.98	620,758.48	644,745.07
3. Angkutan Laut	143,271.16	152,355.62	173,115.73
4. Angk. Sungai, Danau & Penyeybr.	43,204.08	45,510.96	49,712.10
5. Angkutan Udara	1,160,009.05	1,220,314.85	1,286,749.79
6. Jasa Penunjang Angkutan	553,041.33	578,453.64	607,136.29
b. Komunikasi	536,788.60	573,163.19	619,505.71
1. Pos dan Telekomunikasi	508,952.09	544,403.58	588,868.65
2. Jasa Penunjang Komunikasi	27,836.51	28,759.62	30,637.06
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	1,899,187.64	2,041,019.60	2,167,882.16
a. Bank	549,806.18	607,858.36	677,477.55
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	165,652.86	174,762.79	187,769.71
c. Jasa Penunjang Keuangan	73,136.53	78,659.62	83,006.12
d. Sewa Bangunan	941,563.70	996,763.37	1,033,752.61
e. Jasa Perusahaan	169,028.37	182,975.46	185,876.17
9. JASA-JASA	3,669,441.42	3,985,000.25	4,382,171.61
a. Pemerintahan Umum	1,971,238.93	2,168,325.96	2,363,541.72
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	1,489,610.46	1,652,254.44	1,813,973.46
2. Jasa Pemerintah lainnya	481,628.47	516,071.52	549,568.25
b. Swasta	1,698,202.49	1,816,674.29	2,018,629.89
1. Sosial Kemasyarakatan	85,681.29	101,029.64	105,407.89
2. Hiburan & Rekreasi	103,550.62	112,952.63	119,455.21
3. Perorangan & Rumah tangga	1,508,970.59	1,602,692.02	1,793,766.79
PDRB DENGAN MIGAS	27,290,945.61	28,880,686.20	30,753,674.05
PDRB TANPA MIGAS	27,290,945.61	28,880,686.20	30,753,674.05

Tabel 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROPINSI BALI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011 *
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	18.79	18.14	17.34
a. Tanaman Bahan Makanan	8.52	7.95	7.70
b. Tanaman Perkebunan	1.68	1.51	1.46
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	5.27	5.16	4.84
d. Kehutanan	0.01	0.01	0.01
e. Perikanan	3.30	3.51	3.34
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0.64	0.70	0.73
a. Minyak dan Gas Bumi			
b. Pertambangan tanpa Migas			
c. Penggalian	0.64	0.70	0.73
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	9.27	9.18	8.95
a. Industri Migas			
1. Pengilangan Minyak Bumi			
2. Gas Alam Cair			
b. Industri Tanpa Migas	9.27	9.18	8.95
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	1.86	1.96	1.89
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	3.87	3.60	3.54
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	1.90	1.74	1.64
4. Kertas dan Barang Cetak	0.16	0.15	0.16
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	0.89	1.04	1.03
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	0.11	0.11	0.11
7. Logam Dasar Besi & Baja			
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0.32	0.41	0.40
9. Barang lainnya	0.17	0.17	0.17
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1.93	1.89	1.95
a. Listrik	1.50	1.48	1.53
b. Gas			
c. Air Bersih	0.43	0.42	0.42
5. BANGUNAN	4.58	4.55	4.68
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	29.64	30.01	30.62
a. Perdagangan Besar & Eceran	10.58	11.30	12.04
b. Hotel	10.29	9.98	9.96
c. Restoran	8.76	8.74	8.62
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	13.59	14.44	14.46
a. Pengangkutan	11.55	12.45	12.50
1. Angkutan Rel			
2. Angkutan Jalan Raya	2.81	2.99	2.97
3. Angkutan Laut	0.53	0.52	0.56
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.20	0.19	0.20
5. Angkutan Udara	6.41	7.21	7.28
6. Jasa Penunjang Angkutan	1.61	1.54	1.49
b. Komunikasi	2.04	1.99	1.97
1. Pos dan Telekomunikasi	1.95	1.88	1.86
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0.09	0.11	0.11
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	7.02	6.82	6.73
a. Bank	2.12	2.10	2.15
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0.64	0.60	0.60
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.34	0.36	0.35
d. Sewa Bangunan	3.38	3.18	3.10
e. Jasa Perusahaan	0.54	0.57	0.54
9. JASA-JASA	14.54	14.27	14.53
a. Pemerintahan Umum	8.19	8.06	8.08
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	5.99	6.00	6.07
2. Jasa Pemerintah lainnya	2.21	2.06	2.01
b. Swasta	6.35	6.21	6.45
1. Sosial Kemasyarakatan	0.28	0.33	0.32
2. Hiburan & Rekreasi	0.35	0.35	0.34
3. Perorangan & Rumah tangga	5.73	5.53	5.79
PDRB DENGAN MIGAS	100.00	100.00	100.00
PDRB TANPA MIGAS	100.00	100.00	100.00

Tabel 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROPINSI BALI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011 *
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	20.69	19.89	19.10
a. Tanaman Bahan Makanan	10.19	9.53	9.34
b. Tanaman Perkebunan	0.97	0.95	0.89
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	4.97	5.12	4.85
d. Kehutanan	0.01	0.01	0.01
e. Perikanan	4.55	4.29	4.02
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0.58	0.65	0.68
a. Minyak dan Gas Bumi			
b. Pertambangan tanpa Migas			
c. Penggalian	0.58	0.65	0.68
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	10.14	10.17	9.85
a. Industri Migas			
1. Pengilangan Minyak Bumi			
2. Gas Alam Cair			
b. Industri Tanpa Migas	10.14	10.17	9.85
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	2.05	2.02	1.89
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	4.16	4.16	4.08
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	2.16	2.13	2.00
4. Kertas dan Barang Cetak	0.17	0.16	0.17
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	1.00	1.06	1.06
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	0.10	0.11	0.10
7. Logam Dasar Besi & Baja			
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0.38	0.40	0.40
9. Barang lainnya	0.12	0.13	0.13
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1.50	1.52	1.53
a. Listrik	1.12	1.13	1.14
b. Gas			
c. Air Bersih	0.38	0.39	0.39
5. BANGUNAN	3.91	3.97	4.02
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	31.72	31.89	32.53
a. Perdagangan Besar & Eceran	11.83	12.28	12.87
b. Hotel	11.66	11.45	11.69
c. Restoran	8.23	8.16	7.98
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	11.05	11.05	10.99
a. Pengangkutan	9.09	9.06	8.98
1. Angkutan Rel			
2. Angkutan Jalan Raya	2.13	2.15	2.10
3. Angkutan Laut	0.52	0.53	0.56
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.16	0.16	0.16
5. Angkutan Udara	4.25	4.23	4.18
6. Jasa Penunjang Angkutan	2.03	2.00	1.97
b. Komunikasi	1.97	1.98	2.01
1. Pos dan Telekomunikasi	1.86	1.89	1.91
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0.10	0.10	0.10
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	6.96	7.07	7.05
a. Bank	2.01	2.10	2.20
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0.61	0.61	0.61
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.27	0.27	0.27
d. Sewa Bangunan	3.45	3.45	3.36
e. Jasa Perusahaan	0.62	0.63	0.60
9. JASA-JASA	13.45	13.80	14.25
a. Pemerintahan Umum	7.22	7.51	7.69
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	5.46	5.72	5.90
2. Jasa Pemerintah lainnya	1.76	1.79	1.79
b. Swasta	6.22	6.29	6.56
1. Sosial Masyarakat	0.31	0.35	0.34
2. Hiburan & Rekreasi	0.38	0.39	0.39
3. Perorangan & Rumahtangga	5.53	5.55	5.83
PDRB DENGAN MIGAS	100.00	100.00	100.00
PDRB TANPA MIGAS	100.00	100.00	100.00

Tabel 5. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB PROPINSI BALI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011 *
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	302.49	323.08	340.34
a. Tanaman Bahan Makanan	246.00	253.77	270.84
b. Tanaman Perkebunan	590.34	587.59	624.61
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	329.62	357.02	368.88
d. Kehutanan	477.17	417.32	468.41
e. Perikanan	383.91	451.40	472.86
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	337.63	406.02	469.63
a. Minyak dan Gas Bumi			
b. Pertambangan tanpa Migas			
c. Penggalian	337.63	406.02	469.63
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	350.67	384.06	412.45
a. Industri Migas			
1. Pengilangan Minyak Bumi			
2. Gas Alam Cair			
b. Industri Tanpa Migas	350.67	384.06	412.45
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	383.30	445.33	473.35
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	356.53	367.66	397.99
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	300.45	305.25	316.73
4. Kertas dan Barang Cetak	393.61	407.39	472.52
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	345.45	445.40	489.43
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	434.17	493.81	538.44
7. Logam Dasar Besi & Baja			
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	398.19	566.11	613.10
9. Barang lainnya	436.09	486.04	549.61
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	563.90	612.13	692.71
a. Listrik	613.78	666.19	760.32
b. Gas			
c. Air Bersih	438.03	475.70	522.10
5. BANGUNAN	401.46	441.30	500.42
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	326.08	365.27	410.60
a. Perdagangan Besar & Eceran	319.12	376.72	442.36
b. Hotel	290.52	311.64	342.66
c. Restoran	392.92	433.41	471.26
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	438.70	515.44	568.89
a. Pengangkutan	433.39	516.83	571.50
1. Angkutan Rel			
2. Angkutan Jalan Raya	442.49	520.97	569.78
3. Angkutan Laut	365.81	399.27	473.19
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	469.83	503.51	580.75
5. Angkutan Udara	521.37	648.65	722.20
6. Jasa Penunjang Angkutan	261.43	277.51	294.47
b. Komunikasi	471.40	506.89	552.85
1. Pos dan Telekomunikasi	468.10	498.52	544.23
2. Jasa Penunjang Komunikasi	552.02	711.42	763.49
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	338.33	363.46	395.27
a. Bank	410.88	450.90	508.59
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	418.94	437.04	476.93
c. Jasa Penunjang Keuangan	542.55	631.79	675.21
d. Sewa Bangunan	286.54	298.05	319.80
e. Jasa Perusahaan	330.35	388.88	399.69
9. JASA-JASA	377.58	409.78	459.85
a. Pemerintahan Umum	402.38	438.05	483.80
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	388.62	431.13	480.18
2. Jasa Pemerintah lainnya	445.13	459.59	495.06
b. Swasta	349.77	378.08	432.98
1. Sosial Kemasyarakatan	333.91	442.97	474.39
2. Hiburan & Rekreasi	352.31	388.83	415.66
3. Perorangan & Rumah tangga	350.42	374.14	431.92
PDRB DENGAN MIGAS	349.15	386.20	425.51
PDRB TANPA MIGAS	349.15	386.20	425.51

Tabel 6. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB PROPINSI BALI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011 *
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	150.78	153.44	156.86
a. Tanaman Bahan Makanan	133.16	131.78	137.47
b. Tanaman Perkebunan	154.78	159.70	159.12
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	140.65	153.35	154.68
d. Kehutanan	187.23	205.58	220.61
e. Perikanan	239.19	238.63	238.07
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	137.50	164.21	181.46
a. Minyak dan Gas Bumi			
b. Pertambangan tanpa Migas			
c. Penggalian	137.50	164.21	181.46
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	173.70	184.26	190.00
a. Industri Migas			
1. Pengilangan Minyak Bumi			
2. Gas Alam Cair			
b. Industri Tanpa Migas	173.70	184.26	190.00
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	191.26	199.27	198.52
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	173.66	183.85	192.13
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	154.88	161.20	161.31
4. Kertas dan Barang Cetakan	184.19	185.37	212.30
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	175.99	197.82	209.82
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	174.76	205.84	216.80
7. Logam Dasar Besi & Baja			
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	215.94	240.33	257.86
9. Barang lainnya	146.74	163.17	179.42
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	198.84	212.52	228.14
a. Listrik	206.91	220.32	238.06
b. Gas			
c. Air Bersih	178.48	192.82	203.10
5. BANGUNAN	155.26	166.71	179.84
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	157.96	168.06	182.59
a. Perdagangan Besar & Eceran	161.44	177.34	197.94
b. Hotel	148.96	154.83	168.27
c. Restoran	167.09	175.26	182.51
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	161.49	170.81	181.00
a. Pengangkutan	154.35	162.92	171.88
1. Angkutan Rel			
2. Angkutan Jalan Raya	151.56	162.12	168.39
3. Angkutan Laut	165.52	176.02	200.00
4. Angk. Sungai, Danau & Penyabr.	169.24	178.27	194.73
5. Angkutan Udara	156.58	164.72	173.68
6. Jasa Penunjang Angkutan	149.17	156.02	163.76
b. Komunikasi	205.39	219.30	237.04
1. Pos dan Telekomunikasi	202.70	216.82	234.53
2. Jasa Penunjang Komunikasi	270.94	279.92	298.20
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	151.76	163.09	173.23
a. Bank	176.80	195.47	217.86
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	180.26	190.17	204.33
c. Jasa Penunjang Keuangan	193.73	208.36	219.87
d. Sewa Bangunan	132.20	139.95	145.14
e. Jasa Perusahaan	171.44	185.59	188.53
9. JASA-JASA	158.01	171.60	188.70
a. Pemerintahan Umum	160.58	176.63	192.53
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	160.38	177.89	195.30
2. Jasa Pemerintah lainnya	161.19	172.71	183.92
b. Swasta	155.13	165.95	184.40
1. Sosial Kemasyarakatan	171.69	202.45	211.22
2. Hiburan & Rekreasi	174.55	190.40	201.36
3. Perorangan & Rumahtangga	153.12	162.63	182.02
PDRB DENGAN MIGAS	158.04	167.25	178.09
PDRB TANPA MIGAS	158.04	167.25	178.09

Tabel 7. INDEKS BERANTAI PDRB PROPINSI BALI ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011 *
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	114.58	106.81	105.34
a. Tanaman Bahan Makanan	110.21	103.16	106.72
b. Tanaman Perkebunan	127.20	99.53	106.30
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	125.94	108.31	103.32
d. Kehutanan	141.28	87.46	112.24
e. Perikanan	104.85	117.58	104.75
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	112.40	120.25	115.67
a. Minyak dan Gas Bumi			
b. Pertambangan tanpa Migas			
c. Penggalian	112.40	120.25	115.67
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	113.09	109.52	107.39
a. Industri Migas			
1. Pengilangan Minyak Bumi			
2. Gas Alam Cair			
b. Industri Tanpa Migas	113.09	109.52	107.39
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	108.59	116.18	106.29
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	118.83	103.12	108.25
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	122.30	101.60	103.76
4. Kertas dan Barang Cetak	122.46	103.50	115.99
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	96.52	128.94	109.89
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	121.34	113.74	109.04
7. Logam Dasar Besi & Baja			
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	83.98	142.17	108.30
9. Barang lainnya	106.45	111.45	113.08
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	109.88	108.55	113.16
a. Listrik	109.53	108.54	114.13
b. Gas			
c. Air Bersih	111.16	108.60	109.76
5. BANGUNAN	107.91	109.92	113.40
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	120.78	112.02	112.41
a. Perdagangan Besar & Eceran	119.28	118.05	117.42
b. Hotel	120.18	107.27	109.95
c. Restoran	123.37	110.31	108.73
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	124.18	117.49	110.37
a. Pengangkutan	126.81	119.25	110.58
1. Angkutan Rel			
2. Angkutan Jalan Raya	121.18	117.74	109.37
3. Angkutan Laut	113.41	109.15	118.51
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	114.64	107.17	115.34
5. Angkutan Udara	137.65	124.41	111.34
6. Jasa Penunjang Angkutan	107.37	106.15	106.11
b. Komunikasi	111.17	107.53	109.07
1. Pos dan Telekomunikasi	112.66	106.50	109.17
2. Jasa Penunjang Komunikasi	87.26	128.87	107.32
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	108.78	107.43	108.75
a. Bank	114.29	109.74	112.79
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	109.48	104.32	109.13
c. Jasa Penunjang Keuangan	103.16	116.45	106.87
d. Sewa Bangunan	108.12	104.02	107.30
e. Jasa Perusahaan	96.81	117.72	102.78
9. JASA-JASA	111.82	108.53	112.22
a. Pemerintahan Umum	112.98	108.87	110.44
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	112.99	110.94	111.38
2. Jasa Pemerintah lainnya	112.95	103.25	107.72
b. Swasta	110.35	108.09	114.52
1. Sosial Kemasyarakatan	98.13	132.66	107.09
2. Hiburan & Rekreasi	107.30	110.36	106.90
3. Perorangan & Rumah tangga	111.21	106.77	115.44
PDRB DENGAN MIGAS	116.13	110.61	110.18
PDRB TANPA MIGAS	116.13	110.61	110.18

Tabel 8. INDEKS BERANTAI PDRB PROPINSI BALI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011 *
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	105.68	101.76	102.23
a. Tanaman Bahan Makanan	101.55	98.96	104.32
b. Tanaman Perkebunan	112.68	103.18	99.64
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	113.50	109.03	100.87
d. Kehutanan	102.09	109.80	107.31
e. Perikanan	105.92	99.76	99.77
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	105.27	119.43	110.51
a. Minyak dan Gas Bumi			
b. Pertambangan tanpa Migas			
c. Penggalian	105.27	119.43	110.51
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	105.43	106.08	103.12
a. Industri Migas			
1. Pengilangan Minyak Bumi			
2. Gas Alam Cair			
b. Industri Tanpa Migas	105.43	106.08	103.12
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	106.88	104.18	99.63
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	106.22	105.87	104.50
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	105.30	104.08	100.07
4. Kertas dan Barang Cetak	114.23	100.64	114.53
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	100.54	112.41	106.07
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	106.68	117.79	105.32
7. Logam Dasar Besi & Baja			
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	101.36	111.30	107.29
9. Barang lainnya	100.11	111.20	109.96
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	104.71	106.88	107.35
a. Listrik	104.73	106.48	108.05
b. Gas			
c. Air Bersih	104.66	108.03	105.33
5. BANGUNAN	100.91	107.37	107.88
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	106.24	106.39	108.65
a. Perdagangan Besar & Eceran	106.26	109.85	111.61
b. Hotel	106.49	103.94	108.69
c. Restoran	105.84	104.89	104.14
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	105.09	105.77	105.97
a. Pengangkutan	105.14	105.55	105.50
1. Angkutan Rel			
2. Angkutan Jalan Raya	105.29	106.97	103.86
3. Angkutan Laut	103.59	106.34	113.63
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	105.32	105.34	109.23
5. Angkutan Udara	105.98	105.20	105.44
6. Jasa Penunjang Angkutan	103.67	104.60	104.96
b. Komunikasi	104.87	106.78	108.09
1. Pos dan Telekomunikasi	104.91	106.97	108.17
2. Jasa Penunjang Komunikasi	104.11	103.32	106.53
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	102.63	107.47	106.22
a. Bank	103.50	110.56	111.45
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	102.41	105.50	107.44
c. Jasa Penunjang Keuangan	105.96	107.55	105.53
d. Sewa Bangunan	102.32	105.86	103.71
e. Jasa Perusahaan	100.40	108.25	101.59
9. JASA-JASA	105.64	108.60	109.97
a. Pemerintahan Umum	106.51	110.00	109.00
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	107.44	110.92	109.79
2. Jasa Pemerintah lainnya	103.71	107.15	106.49
b. Swasta	104.65	106.98	111.12
1. Sosial Kemasyarakatan	100.85	117.91	104.33
2. Hiburan & Rekreasi	103.39	109.08	105.76
3. Perorangan & Rumahtangga	104.96	106.21	111.92
PDRB DENGAN MIGAS	105.33	105.83	106.49
PDRB TANPA MIGAS	105.33	105.83	106.49

**Tabel 9. INDEKS HARGA IMPLISIT PDRB PROPINSI BALI
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)**

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011 *
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	200.61	210.56	216.97
a. Tanaman Bahan Makanan	184.74	192.57	197.01
b. Tanaman Perkebunan	381.41	367.93	392.53
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	234.36	232.81	238.47
d. Kehutanan	254.85	203.00	212.32
e. Perikanan	160.50	189.17	198.62
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	245.56	247.26	258.80
a. Minyak dan Gas Bumi			
b. Pertambangan tanpa Migas			
c. Penggalian	245.56	247.26	258.80
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	201.89	208.43	217.07
a. Industri Migas			
1. Pengilangan Minyak Bumi			
2. Gas Alam Cair			
b. Industri Tanpa Migas	201.89	208.43	217.07
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	200.41	223.48	238.44
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	205.30	199.98	207.14
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	193.99	189.36	196.35
4. Kertas dan Barang Cetak	213.70	219.77	222.57
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	196.29	225.16	233.26
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	248.44	239.90	248.36
7. Logam Dasar Besi & Baja			
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	184.40	235.56	237.76
9. Barang lainnya	297.20	297.88	306.33
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	283.59	288.04	303.64
a. Listrik	296.64	302.37	319.38
b. Gas			
c. Air Bersih	245.42	246.71	257.07
5. BANGUNAN	258.57	264.72	278.26
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	206.43	217.35	224.87
a. Perdagangan Besar & Eceran	197.67	212.43	223.49
b. Hotel	195.03	201.29	203.63
c. Restoran	235.16	247.30	258.21
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	271.65	301.77	314.31
a. Pengangkutan	280.77	317.23	332.49
1. Angkutan Rel			
2. Angkutan Jalan Raya	291.96	321.34	338.37
3. Angkutan Laut	221.01	226.84	236.59
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	277.61	282.43	298.23
5. Angkutan Udara	332.98	393.79	415.81
6. Jasa Penunjang Angkutan	175.26	177.86	179.82
b. Komunikasi	229.52	231.13	233.23
1. Pos dan Telekomunikasi	230.93	229.92	232.05
2. Jasa Penunjang Komunikasi	203.74	254.15	256.03
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	222.94	222.86	228.18
a. Bank	232.40	230.68	233.45
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	232.41	229.81	233.42
c. Jasa Penunjang Keuangan	280.06	303.22	307.09
d. Sewa Bangunan	216.75	212.97	220.34
e. Jasa Perusahaan	192.69	209.54	212.01
9. JASA-JASA	238.96	238.80	243.69
a. Pemerintahan Umum	250.58	248.01	251.28
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	242.31	242.35	245.87
2. Jasa Pemerintah lainnya	276.16	266.10	269.17
b. Swasta	225.47	227.82	234.80
1. Sosial Kemasyarakatan	194.48	218.81	224.59
2. Hiburan & Rekreasi	201.84	204.21	206.43
3. Perorangan & Rumah tangga	228.85	230.05	237.29
PDRB DENGAN MIGAS	220.92	230.92	238.92
PDRB TANPA MIGAS	220.92	230.92	238.92

**Tabel 10. LAJU INFLASI PDRB PROPINSI BALI
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)**

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011 *
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	8.43	4.96	3.04
a. Tanaman Bahan Makanan	8.53	4.24	2.30
b. Tanaman Perkebunan	12.89	-3.53	6.68
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	10.96	-0.66	2.43
d. Kehutanan	38.38	-20.35	4.59
e. Perikanan	-1.01	17.86	5.00
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	6.78	0.69	4.67
a. Minyak dan Gas Bumi			
b. Pertambangan tanpa Migas			
c. Penggalian	6.78	0.69	4.67
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	7.26	3.24	4.15
a. Industri Migas			
1. Pengilangan Minyak Bumi			
2. Gas Alam Cair			
b. Industri Tanpa Migas	7.26	3.24	4.15
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	1.60	11.52	6.69
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	11.87	-2.59	3.58
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	16.14	-2.39	3.69
4. Kertas dan Barang Cetakan	7.20	2.84	1.28
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	-4.00	14.71	3.60
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	13.74	-3.44	3.53
7. Logam Dasar Besi & Baja			
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	-17.14	27.74	0.94
9. Barang lainnya	6.33	0.23	2.84
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	4.94	1.57	5.42
a. Listrik	4.59	1.93	5.62
b. Gas			
c. Air Bersih	6.21	0.52	4.20
5. BANGUNAN	6.94	2.38	5.12
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	13.69	5.29	3.46
a. Perdagangan Besar & Eceran	12.25	7.47	5.21
b. Hotel	12.86	3.21	1.17
c. Restoran	16.56	5.16	4.41
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	18.16	11.09	4.16
a. Pengangkutan	20.60	12.99	4.81
1. Angkutan Rel			
2. Angkutan Jalan Raya	15.09	10.06	5.30
3. Angkutan Laut	9.48	2.64	4.30
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	8.85	1.74	5.59
5. Angkutan Udara	29.88	18.26	5.59
6. Jasa Penunjang Angkutan	3.57	1.49	1.10
b. Komunikasi	6.01	0.70	0.91
1. Pos dan Telekomunikasi	7.39	-0.44	0.93
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-16.19	24.74	0.74
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	6.00	-0.04	2.39
a. Bank	10.42	-0.74	1.20
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	6.90	-1.12	1.57
c. Jasa Penunjang Keuangan	-2.65	8.27	1.28
d. Sewa Bangunan	5.67	-1.74	3.46
e. Jasa Perusahaan	-3.58	8.75	1.18
9. JASA-JASA	5.85	-0.07	2.05
a. Pemerintahan Umum	6.08	-1.03	1.32
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	5.16	0.02	1.45
2. Jasa Pemerintah lainnya	8.91	-3.64	1.15
b. Swasta	5.45	1.04	3.06
1. Sosial Kemasyarakatan	-2.69	12.51	2.64
2. Hiburan & Rekreasi	3.78	1.18	1.08
3. Perorangan & Rumahtangga	5.96	0.53	3.15
PDRB DENGAN MIGAS	10.26	4.52	3.47
PDRB TANPA MIGAS	10.26	4.52	3.47

Tabel 11. LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROPINSI BALI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011 *	Rata-rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
1. PERTANIAN	14.58	6.81	5.34	8.91
a. Tanaman Bahan Makanan	10.21	3.16	6.72	6.70
b. Tanaman Perkebunan	27.20	-0.47	6.30	11.01
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	25.94	8.31	3.32	12.53
d. Kehutanan	41.28	-12.54	12.24	13.66
e. Perikanan	4.85	17.58	4.75	9.06
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	12.40	20.25	15.67	16.11
a. Minyak dan Gas Bumi				
b. Pertambangan tanpa Migas				
c. Penggalian	12.40	20.25	15.67	16.11
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	13.09	9.52	7.39	10.00
a. Industri Migas				
1. Pengilangan Minyak Bumi				
2. Gas Alam Cair				
b. Industri Tanpa Migas	13.09	9.52	7.39	10.00
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	8.59	16.18	6.29	10.36
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	18.83	3.12	8.25	10.07
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	22.30	1.60	3.76	9.22
4. Kertas dan Barang Cetak	22.46	3.50	15.99	13.98
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	-3.45	28.94	9.89	11.78
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	21.34	13.74	9.04	14.71
7. Logam Dasar Besi & Baja				
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	-16.02	42.17	8.30	11.49
9. Barang lainnya	6.45	11.45	13.08	10.33
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	9.88	8.55	13.16	10.53
a. Listrik	9.53	8.54	14.13	10.73
b. Gas				
c. Air Bersih	11.16	8.60	9.76	9.84
5. BANGUNAN	7.91	9.92	13.40	10.41
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	20.78	12.02	12.41	15.07
a. Perdagangan Besar & Eceran	19.28	18.05	17.42	18.25
b. Hotel	20.18	7.27	9.95	12.47
c. Restoran	23.37	10.31	8.73	14.14
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	24.18	17.49	10.37	17.35
a. Pengangkutan	26.81	19.25	10.58	18.88
1. Angkutan Rel				
2. Angkutan Jalan Raya	21.18	17.74	9.37	16.09
3. Angkutan Laut	13.41	9.15	18.51	13.69
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	14.64	7.17	15.34	12.38
5. Angkutan Udara	37.65	24.41	11.34	24.47
6. Jasa Penunjang Angkutan	7.37	6.15	6.11	6.54
b. Komunikasi	11.17	7.53	9.07	9.26
1. Pos dan Telekomunikasi	12.66	6.50	9.17	9.44
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-12.74	28.87	7.32	7.82
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	8.78	7.43	8.75	8.32
a. Bank	14.29	9.74	12.79	12.27
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	9.48	4.32	9.13	7.64
c. Jasa Penunjang Keuangan	3.16	16.45	6.87	8.83
d. Sewa Bangunan	8.12	4.02	7.30	6.48
e. Jasa Perusahaan	-3.19	17.72	2.78	5.77
9. JASA-JASA	11.82	8.53	12.22	10.85
a. Pemerintahan Umum	12.98	8.87	10.44	10.76
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	12.99	10.94	11.38	11.77
2. Jasa Pemerintah lainnya	12.95	3.25	7.72	7.97
b. Swasta	10.35	8.09	14.52	10.99
1. Sosial Kemasyarakatan	-1.87	32.66	7.09	12.63
2. Hiburan & Rekreasi	7.30	10.36	6.90	8.19
3. Perorangan & Rumah tangga	11.21	6.77	15.44	11.14
PDRB DENGAN MIGAS	16.13	10.61	10.18	12.31
PDRB TANPA MIGAS	16.13	10.61	10.18	12.31

Tabel 12. LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROPINSI BALI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011 *	Rata-rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
1. PERTANIAN	5.68	1.76	2.23	3.22
a. Tanaman Bahan Makanan	1.55	-1.04	4.32	1.61
b. Tanaman Perkebunan	12.68	3.18	-0.36	5.17
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	13.50	9.03	0.87	7.80
d. Kehutanan	2.09	9.80	7.31	6.40
e. Perikanan	5.92	-0.24	-0.23	1.82
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	5.27	19.43	10.51	11.73
a. Minyak dan Gas Bumi				
b. Pertambangan tanpa Migas				
c. Penggalian	5.27	19.43	10.51	11.73
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5.43	6.08	3.12	4.88
a. Industri Migas				
1. Pengilangan Minyak Bumi				
2. Gas Alam Cair				
b. Industri Tanpa Migas	5.43	6.08	3.12	4.88
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	6.88	4.18	-0.37	3.56
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	6.22	5.87	4.50	5.53
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	5.30	4.08	0.07	3.15
4. Kertas dan Barang Cetak	14.23	0.64	14.53	9.80
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	0.54	12.41	6.07	6.34
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	6.68	17.79	5.32	9.93
7. Logam Dasar Besi & Baja				
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	1.36	11.30	7.29	6.65
9. Barang lainnya	0.11	11.20	9.96	7.09
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	4.71	6.88	7.35	6.31
a. Listrik	4.73	6.43	8.05	6.42
b. Gas				
c. Air Bersih	4.66	8.03	5.33	6.01
5. BANGUNAN	0.91	7.37	7.88	5.39
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	6.24	6.39	8.65	7.09
a. Perdagangan Besar & Eceran	6.26	9.85	11.61	9.24
b. Hotel	6.49	3.94	8.69	6.37
c. Restoran	5.84	4.89	4.14	4.96
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	3.09	5.77	5.97	5.61
a. Pengangkutan	5.14	5.55	5.50	5.40
1. Angkutan Rel				
2. Angkutan Jalan Raya	5.29	6.97	3.86	5.38
3. Angkutan Laut	3.59	6.34	13.63	7.85
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	5.32	5.34	9.23	6.63
5. Angkutan Udara	5.98	5.20	5.44	5.54
6. Jasa Penunjang Angkutan	3.67	4.60	4.96	4.41
b. Komunikasi	4.87	6.78	8.09	6.58
1. Pos dan Telekomunikasi	4.91	6.97	8.17	6.68
2. Jasa Penunjang Komunikasi	4.11	3.32	6.53	4.65
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	2.63	7.47	6.22	5.44
a. Bank	3.50	10.56	11.45	8.50
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	2.41	5.50	7.44	5.12
c. Jasa Penunjang Keuangan	5.96	7.55	5.53	6.35
d. Sewa Bangunan	2.32	5.86	3.71	3.96
e. Jasa Perusahaan	0.40	8.25	1.59	3.41
9. JASA-JASA	5.64	8.60	9.97	8.07
a. Pemerintahan Umum	6.51	10.00	9.00	8.50
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	7.44	10.92	9.79	9.38
2. Jasa Pemerintah lainnya	3.71	7.15	6.49	5.78
b. Swasta	4.65	6.98	11.12	7.58
1. Sosial Kemasyarakatan	0.85	17.91	4.33	7.70
2. Hiburan & Rekreasi	3.39	9.08	5.76	6.08
3. Perorangan & Rumah tangga	4.96	6.21	11.92	7.70
PDRB DENGAN MIGAS	5.33	5.83	6.49	5.88
PDRB TANPA MIGAS	5.33	5.83	6.49	5.88

Tabel 13. ANGKA AGREGATIF, JUMLAH PENDUDUK DAN PDRB PROPINSI BALI ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN KONSTAN 2000, TAHUN 2009 - 2011

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011 *
[1]	[2]	[3]	[4]
NILAI ABSOLUT			
PDRB - Harga Berlaku (Jutaan Rp.)	60,292,239.32	66,690,598.13	73,478,161.87
PDRB - Harga Konstan (Jutaan Rp.)	27,290,945.61	28,880,686.20	30,753,674.05
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	3,817,447.00	3,890,757.00	3,971,257.00
PDRB/kapita Harga Berlaku (Rp.)	15,793,864.15	17,140,777.01	18,502,494.77
PDRB/kapita Harga Konstan (Rp.)	7,149,004.46	7,422,896.42	7,744,065.43
INDEKS (2000 = 100)			
PDRB - Harga Berlaku	349.15	386.20	425.51
PDRB - Harga Konstan	158.04	167.25	178.09
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	122.69	125.05	127.64
PDRB/kapita Harga Berlaku	284.57	308.84	333.38
PDRB/kapita Harga Konstan	128.81	133.75	139.53
INDEKS BERANTAI			
PDRB - Harga Berlaku	116.13	110.61	110.18
PDRB - Harga Konstan	105.33	105.83	106.49
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	102.11	101.92	102.07
PDRB/kapita Harga Berlaku	113.74	108.53	107.94
PDRB/kapita Harga Konstan	103.16	103.83	104.33
INDEKS IMPLISIT			
Produk Domestik Regional Bruto	220.92	230.92	238.92

DATA

Mencerdaskan Bangsa

<http://bali.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

Jl. Raya Puputan (Renon), Telepon: (0361) 238159, 243162, Denpasar 80226
Fax: (0361) 238162, E-Mail: bps5100@bps.go.id